Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Dalam Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi (Studi Deskripsitf Kualitatif Pada Hunian Tetap Dongkelsari)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Oleh

BRILLIANT AYESHA NADINE A NARRA

13321138

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

SKRIPSI

POLA KOMUNKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI GUNUNG MERAPI
(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA HUNIAN TETAP DONGKELSARI)

Disusun oleh:

BRILLIANT AYESHA NADINE A NARRA

13321138

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Tanggal:.....

Dosen Pembimbing Skripsi,

Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,M.A

NIDN 0516087901

SKRIPSI

POLA KOMUNKASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI GUNUNG MERAPI
(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PADA HUNIAN TETAP DONGKELSARI)

Disusun Oleh:

BRILLIANT AYESHA NADINE A NARRA

13321138

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 23 JAN 2018

Dewan Penguji:

1. **Ketua : Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,M.A** (.....)
   NIDN 0516087901
2. **Anggota : Mutia Dewi, S.Sos.,M.I.Kom** (.....)
   NIDN 0520028302

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,MA

NIDN 0516087901

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Brilliant Ayesha Nadine A Narra
No. Mahasiswa	: 13321138
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta (Studi Deskriptif terhadap Bencana di Gunung Merapi)

Melalui surat ini, menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti plagiasi, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya plagiasi atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2017

Yang menyatakan,



Brilliant Ayesha Nadine A Narra

13321138

iv

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon dan Faksimile (0274) 868504,869375
Website: bpbd.slemankab.go.id, E-mail: bpbd@slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/0372

Yang bertadatangan di bawah ini :

Nama	: Lastra, S.IP, M.Si
NIP	: 19750404 199403 1 002
Jabatan	: Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman

menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama	: Brilliant Ayesha Nadine. A. Narra
NIM	: 13321138
Universitas	: UII /Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Fakultas	: Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII
Judul Penelitian	: **" POLA KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA DARI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YOGYAKARTA. STUDI TENTANG BENCANA PADA GUNUNG MERAPI "**

Benar telah melaksanakan penelitian terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 1 April 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 3 April 2017
a.n. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kepala Sektetariat
u.b.
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

LASTRA, S.IP, M.Si
NIP 19750404 199403 1 002

MOTTO

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, akan mendapatkannya"
(Mahfudzot)

"Dan Allah menyertai orang-orang yang sabar"
(QS. Al-Anfal : 66)

"Semoga, semesta mengaminkan segala do'a. pun malaikat-malaikat, sembari membentangkan sayapnya melindungi seorang hamba yang sedang berbisik ke arah tanah dan berharap didengar oleh langit"

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :
Alm. Bapak Amran Taufik Narra, Ibu Sriati, Bapak Rovian Rusmin, Ibu Nazifah Chatib, Saudara/i saya Muhammad Raizuli A Narra, Adinda Rayhana A Narra, Muhammad Adelard Ardell Rovian Rusmin, dan Muhammad Nabil Daffansyah A Narra. Serta para pelajar dan penekun ilmu di negeri Indonesia tercinta ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kekuatan dan juga kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta (Studi Deskriptif terhadap Bencana di Gunung Merapi).** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Dalam pelaksanaan penelitian hingga pada tahap penyelesaian, penulis telah mendapatkan bantuan pemikiran serta dorongan moral dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Amran Taufik Narra dan Ibu Sriati,** yang telah mendukung saya secara moral dan materil, serta mempercayai saya untuk melanjutkan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. **Saudara/i saya, Muhammad Raizuli A Narra, Adinda Rayhana A Narra, Muhammad Adelard Ardell Rovian Rusmin, dan Muhammad Nabil Daffansyah,** yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya selama masa kuliah.
3. **Bapak Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan juga dosen pembimbing penulisan dan penyusunan skripsi saya ini, yang telah mendukung dan sabar membimbing saya selama pengerjaan skripsi ini.

4. **Seluruh Staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia,** yang telah banyak membantu saya dalam urusan perkuliahan, surat-menyurat perizinan, peminjaman alat laboratorium, dan lainnya.
5. **Seluruh pimpinan dan staff di BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta, Pemerintahan Desa Kepuharjo, *Combine Resource Constitution*, serta Hunian Tetap Dongkelsari**, yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian, dan atas ketersediaan waktu dan data-data yang diberikan kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.
6. **Sahabat-sahabat saya, Yolanda Dwi Asmara, Vinny Fhiadina Nasution, Rufalzyh, Novan Fauzi Rahman, Nadia Aisyah Salamah, Nur Amanah Ilham Atjo, Anindita Trinoviana, Amelia Diva Rachmanti, Ratih Gayatri, dan Apriska Fitriani,** yang telah mendukung dan menerima segala kebaikan dan keburukan saya selama masa kuliah.
7. **Serta kepada seluruh pihak,** yang telah membantu melancarkan dan mensukseskan pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segenap kritik dan saran sangat penulis hargai. Namun, penulis juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh kalangan yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2017

Brilliant Ayesha Nadine A Narra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK iv
HALAMAN BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR BAGAN xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.4.1 Manfaat Akademis 4
1.4.2 Manfaat Praktis 4
1.5 Tinjauan Pustaka 5
1.5.1 Penelitian Terdahulu 5
1.5.2 Kerangka Teori 10
1.6 Metode Penelitian 20
1.6.1 Pendekatan Penelitian 20
1.6.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 20
1.6.3 Narasumber atau Informan Penelitian 20
1.6.4 Pengumpulan Data 20
1.6.5 Analisis Data 22

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 24
2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman 24
2.2 Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta 25
2.3 *Combine Resource Institution* (CRI) Yogyakarta 27
2.4 Hunian Tetap (huntap) Dongkelsari 27
BAB III TEMUAN PENELITIAN 29
3.1 Pengalaman Erupsi Gunung Merapi 2010 29
3.1.1 Pengalaman Saat Pra Erupsi Gunung Merapi 2010 29
3.1.2 Pengalaman Saat Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi 2010 32
3.1.3 Pengalaman Saat Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 34
3.2 Otoritas Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 35
3.2.1 Kewajiban Pemerintah 35
3.2.2 Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi 37
3.2.3 Penetapan Status dan Tingkatan Bencana di Gunung Merapi 40
3.2.4 Menentukan Peta Rawan Bencana di Gunung Merapi 41
3.3 Mitigasi Pra Bencana Gunung Merapi 42
3.4 Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi 47
3.4.1 Sumber Informasi Kebencanaan Gunung Merapi 47
3.4.2 Isi Informasi Kebencanaan Gunung Merapi 49
3.4.3 Media Informasi Kebencanaan Gunung Merapi 51
3.5 Hambatan dan Kritik Atas Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi 58
BAB IV PEMBAHASAN 63
4.1 Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi 63
4.2 Mitigasi Pra Bencana Gunung Merapi 64
4.3 Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Gunung Merapi 67
4.3.1 Pola Komunikasi Masa Normal Gunung Merapi 67
4.3.2 Pola Komunikasi Masa Tanggap Darurat Gunung Merapi ... 72
BAB V PENUTUP 80

5.1 Kesimpulan 80
5.2 Keterbatasan Peneliti 83
5.3 Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 91

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPBD Sleman 25
Bagan 2.2 Struktur Organisasi BPPTKG Yogyakarta.....26
Bagan 3.1 Alur Komunikasi Utama.....49
Bagan 3.2 Alur Komunikasi Masa Normal 56
Bagan 3.3 Alur Komunikasi Masa Tanggap Darurat 57
Bagan 4.1 Warga Diposisikan Sebagai Objek.....67
Bagan 4.2 Alur Komunikasi Tanggap Darurat Untuk Masa Yang Akan Datang..78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta KRB Gunung Merapi 42
Gambar 3.2 Gladi Lapang Sekolah Siaga Bencana di SMK Negeri 1 Depok.....43
Gambar 3.3 SOP Tanggap Darurat Bencana Berbasis Keluarga.....44
Gambar 3.4 Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tanggal 26 Mei - 1 Juni 2017....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 88
Lampiran 2 Dokumentasi..... 98

ABSTRAK
13321138

Brilliant Ayesha Nadine A Narra. 13321138. Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta. (Studi Deskriptif terhadap Bencana di Gunung Merapi). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2017.

Bencana demi bencana telah melanda wilayah di Indonesia. Salah satu bencana alam yang menjadi langganan negara Indonesia adalah gunung meletus. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api teraktif yang terdapat di wilayah Jawa Tengah. Dan pada lingkaran Gunung Merapi, Sleman merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi dengan jumlah korban yang cukup banyak. Penelitian ini berfokus pada pola komunikasi BPBD Sleman dalam penanggulangan bencana di Gunung Merapi. Berdasarkan kerangka pikir di atas, penelitian ini hendak menjawab : alur komunikasi BPBD Sleman dalam upaya penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi, dan pola komunikasi model apa yang digunakan BPBD Sleman.

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori komunikasi bencana (*disaster communication*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara pribadi dan terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sembilan narasumber, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Staff Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta, Kepala Pemerintah Desa Kepuharjo, Kepala Dukuh Huntap Dongkelsari, Staff Pengelolaan Manajemen Informasi Bencana CRI, dan empat warga huntap Dongkelsari.

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, alur komunikasi BPBD Sleman dalam upaya penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi, baik pada masa normal maupun masa tanggap darurat adalah alur komunikasi terstruktur dan non terstruktur. Kedua, model pola komunikasi yang BPBD Sleman gunakan adalah gabungan dari model rantai (*chain*) dan model jaringan bebas (*all channel*). Dimana BPBD Sleman melakukan penyebaran informasi secara terstruktur, sesuai jalur birokrasi *upward* ke BPPTKG Yogyakarta untuk mendapatkan informasi Gunung Merapi dan *downward* ke pejabat, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, lurah, komunitas relawan, kemudian informasi sampai kemasyarakat untuk penyampaian informasi secara berantai. Namun, ada pula alur komunikasi secara non terstruktur dimana BPPTKG Yogyakarta sebagai sumber informasi kebencanaan Gunung Merapi menyebarkan informasi kebencanaan melalui berbagai medium agar sampai langsung ke masyarakat tanpa melalui jalur truktur birokrasi. Adapun medium yang paling sering digunakan adalah *WhatsApp.* Hal ini relevan dengan pola komunikasi model rantai dan jaringan bebas.

Kata kunci : komunikasi bencana, pola komunikasi, pemerintah, gunung merapi

ABSTRACT
13321138

Brilliant Ayesha Nadine A Narra. 13321138. Communication Pattern of Disaster Relief from Government to Yogyakarta Society. (Descriptive Study of Disaster at Mount Merapi). Bachelor's Thesis. Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social and Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia. 2017.

Disaster after disaster has hit the region in Indonesia. One of the natural disasters that become subscriptions to the country of Indonesia is the volcano eruption. Mount Merapi is one of the most active volcanoes located in Central Java. And within the circle of Mount Merapi, Sleman is one of the areas affected by the eruption of Mount Merapi with a considerable number of victims. This study focuses on the existing disaster prevention communication pattern in Mount Merapi. Based on the above framework, this research is about to answer the following: disaster information resources in Mount Merapi, the content of the message delivered, the media used to publish the information, and who the sender and the recipient of the message.

To answer the four questions, this research uses qualitative descriptive method with disaster communication theory and data collection through observation, personal and structured interview, and documentation. This study took nine sources, namely Head of Prevention and Preparedness of BPBD Sleman, Section of Mount Merapi Staff of BPPTKG Yogyakarta, Head of Kepuharjo Village Government, Head of Dukuh Huntap Dongkelsari, Disaster Management Information Management Staff of CRI, and four people huntap Dongkelsari.

This research has found some important findings. First, the communication flow of BPBD Sleman in the effort to disseminate disaster information and disaster management in Mount Merapi, both during normal and emergency response period is structured and non structured communication channel. Second, the model of communication pattern that BPBD Sleman uses is a combination of chain model (chain) and free network model (all channel). Where the BPBD Sleman do the dissemination of information in a structured, appropriate path upward bureaucracy to BPPTKG Yogyakarta to obtain information of Mount Merapi and downward to officials, District Government, District, Village Government, village heads, volunteer community, then information to community for the delivery of information in chains. However, there is also a non structured communication channel where BPPTKG Yogyakarta as a source of disaster information Mount Merapi disseminate disaster information through various mediums to get directly to the community without going through the bureaucratic structure. The most commonly used medium is WhatsApp. This is relevant to the communication pattern of chain models and free networks.

Keywords: disaster communication, communication pattern, government, mount merapi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rentetan bencana demi bencana telah melanda wilayah di Indonesia. Beberapa bencana alam tersebut seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung, gempa bumi, kemarau berkepanjangan hingga tsunami. Hal ini menyebabkan Indonesia dikenal oleh dunia luar sebagai negara yang rawan akan bencana alam. Salah satu bencana alam yang menjadi langganan negara Indonesia adalah gunung meletus.

Gunung api memiliki potensi bencana yang cukup besar pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Indonesia setidaknya tercatat memiliki 127 gunung aktif (*http://www.beritasatu.com/nasional/296381-bnpb-dari-127-gunung-aktif-di-indonesia-3-masih-meletus.html*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.17 WIB). Salah satu gunung api yang ada di Indonesia adalah Gunung Merapi yang terdapat di wilayah Jawa Tengah tepatnya pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada abad ke-20 saja, Gunung Merapi sedikitnya telah terjadi 28 kali letusan, dengan letusan terbesar terjadi pada tahun 1931. Selanjutnya, tercatat kembali terjadi letusan yang cukup besar pada tahun 1961 dan 2010 (*http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB).

Pada tanggal 26 Oktober 2010, kembali terjadi letusan Gunung Merapi yang disertai awan panas serta dentuman secara berkala, hingga pada tanggal 5 November 2010 terjadi erupsi besar. Sesaat setelah erupsi terjadi, sirine tanda bahaya berbunyi, mengakibatkan warga yang mulai panik berlarian keluar rumah untuk mengevakuasikan diri menuju tempat evakuasi yang disediakan yaitu Stadion Maguwoharjo dan Gedung Olah Raga (GOR) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (*http://m.tribunnews.com/amp/regional/2010/11/05/inilah-kronologi-letusan-*

dahsyat-merapi-di-jumat-pagi, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 10.01 WIB).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 347 korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi 2010 tersebut. Korban jiwa rata-rata menimpa warga yang berada di sekitar Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali. Adapun jumlah pengungsi mencapai 410.388 orang (*http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.45 WIB).

Menurut seorang pengamat, Budhi Kuswan Susilo, dalam tulisannya di *kompasiana*, ada dua hal menarik dari kejadian erupsi Gunung Merapi 2010 yang pertama ditinjau dari respon yang dilakukan pemerintah dan yang kedua ditinjau dari kepercayaan masyarakat terhadap bencana erupsi Gunung Merapi. Pemerintah, dalam menangani bencana menetapkan adanya aktivitas Gunung Merapi atas dasar pemantauan yang dilakukan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta. Kemudian pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan evakuasi ke tempat yang telah disediakan. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang sudah dievakuasi, kembali beraktivitas di desa mereka karena mereka meyakini belum ada tanda-tanda pasti Gunung Merapi akan segera meletus. Selain itu, Mbah Maridjan yang dipercaya masyarakat sebagai juru kunci yang menjaga Gunung Merapi, belum mendapatkan firasat Gunung Merapi akan meletus (Susilo, *http://www.kompasiana.com/budhikuswansusilo/letusan-gunung-merapi-antara-mitigasi-bencana-dan-keyakinan-masyarakat_55003ac5813311e118fa7312*, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 10.45 WIB).

Dari fakta-fakta yang ada, seharusnya pemerintah memiliki alur komunikasi dalam memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara akurat dan komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya penyelamatan masyarakat saat terjadi bencana. sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi

penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5).

Selain itu, masyarakat memiliki hak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat 1 huruf (b) yaitu, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan pasal 26 ayat 1 huruf (c) yaitu, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26, ayat 1, huruf b dan c).

Dari berbagai uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana alur informasi yang diterapkan pemerintah terkait kebencanaan dan pola konsumsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah. Adapun pembatasan pola komunikasi bencana dalam penelitian ini yaitu hanya pada bencana erupsi Gunung Merapi 2010 yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Pola komunikasi dalam penanggulangan bencana pada Gunung Merapi menggambarkan alokasi dan bentuk jalur komunikasi yang secara umum ada dalam masyarakat. Pola komunikasi di sini, dapat diartikan sebagai bentuk alur komunikasi mulai dari pemerintah hingga sampai ke masyarakat untuk menyebarkan informasi kebencanaan. Alur komunikasi yang dimaksud berupa model komunikasi Robbins dengan lima model, yaitu model rantai (*chain*), model roda (*wheel*), model lingkaran (*circle*), model bebas (*all channel*), dan model huruf "*Y*" (Rosady, 1998 : 94).

Di sini peneliti tertarik untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam memberikan dan menyebarkan informasi kebencanaan yang terjadi di Gunung Merapi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab permasalahan :

1. Bagaimana alur komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dalam upaya penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi?

2. Apa model pola komunikasi yang digunakan BPBD Sleman?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang hendak dijawab, penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Menjelaskan alur komunikasi yang digunakan BPBD Sleman dalam penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi.
2. Menjelaskan model pola komunikasi yang digunakan BPBD Sleman dalam penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian di atas, akan membawa kontribusi besar sebagai sumbangsih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah tercantum di rumusan masalah. Secara khusus, penelitian akan memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya :

1.4.1 Manfaat Akademis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi bencana yang berkaitan dengan pola komunikasi.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya, khususnya dalam hal pola komunikasi penanggulangan bencana di Gunung Merapi sehingga dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi terkait pola komunikasi penanggulangan bencana bagi BPPTKG dan BPBD.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan baik masyarakat maupun pemerintah di Yogyakarta, khususnya daerah Sleman.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu sebagai referensi. Dengan tujuan untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai objek-objek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah suatu yang wajar untuk saling melengkapi berdasarkan studi pustaka, peneliti menemukan beberapa referensi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang terkait dan menjadi bahan acuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan :

Penelitian terdahulu yang pertama, peneliti ambil dari penelitian internasional yang dilakukan oleh Dwie Irmawaty Gultom dan Zita Joyce dengan judul penelitian "*Crisis Communication Capacity for Disaster Resilience : Community Participation of Information Providing and Verifying in Indonesian Volcanic Eruption*", Jurusan *Media and Communication, University of Canterbury, New Zealand*. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana komunitas Jalin Merapi merangkul kapasitas masyarakat lokal dalam menyediakan, berbagi, dan memberikan informasi pada saat erupsi Merapi 2010 (Gultom and Joyce, http://www.communityresearch.org.nz/wp-content/uploads/formidable/Crisis_communication_capacity_for_disaster_resilience.pdf, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 16.16 WIB).

Metode yang digunakan Gultom dan Joyce adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan fokus kelompok di empat kabupaten yang ada disekitar Gunung Merapi. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas Jalin Merapi mampu menggabungkan antara kapasitas masyarakat, radio komunitas dan kemampuan media sosial yang berhasil menyebarkan informasi Gunung Merapi ke masyarakat luas, khuusnya masyarakat lokal. Sehingga hal ini membantu meringankan adanya informasi krisis yang terjadi di masyarakat dan membuat masyarakat lebih mengandalkan informasi dari Jalin Merapi daripada dari informasi yang diotorisasi (Gultom and Joyce, http://www.communityresearch.org.nz/wp-content/uploads/formidable/Crisis_communication_capacity_for_disaster_resilience.pdf, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 16.31 WIB).

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Firman Wahyudi dengan judul jurnal "Pola Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau", Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah dan menanggulangi bencana asap di Riau (Wahyudi, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016 : 1-15).

Metode yang digunakan Wahyudi adalah metode deskriptif kualitatif yang mana menekankan penjelasan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola komunikasi BPBD Riau dalam mencegah bencana asap yaitu pola roda. Pola roda yang digunakan BPBD Riau saat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BMKG dan BLH. Pola

roda juga digunakan saat tanggap darurat, bahwa ada pimpinan yang memberi perintah dan arahan yang jelas dalam proses penyampaian pesannya (Wahyudi, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016 : 1-15).

Selanjutnya, penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Puji Lestari, Ica Dwi Putri Br Sembiring, Agung Prabowo, Arif Wibawa, dan Retno Hendariningrum dengan judul jurnal "Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat", Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen komunikasi bencana yang berlangsung saat tanggap darurat pada bencana Gunung Sinabung 2010, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Lestari, Puji, dkk, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Vol. 10 No. 2, Desember,2013 : 139-158).

Metode yang digunakan Lestari, dkk adalah metode deskriptif, interpretatif, dan evaluatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Dimulai dari penyajian data, reduksi, pembuatan kategorisasi, interpretasi dan simpulan, dan kebijakan berupa model manajemen komunikasi bencana. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus menentukan jalur evakuasi dan tempat pengungsian bagi warga, serta mendidik warga dan menyadarkan warga akan bahaya bencana serta membuat SOP untuk mengatur tindakan yang harus dilakukan warga, perlunya kerjasama antara pemerintah dengan warga dalam menentukan kebutuhan yang dilihat dari kapasitas warga, dan membuat rencana kontijensi untuk setiap ancaman bahaya bencana (Lestari, Puji, dkk, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Vol. 10 No. 2, Desember,2013 : 139-158).

Penelitian terdahulu keempat berasal dari skripsi Lucky Agustina Kurniawati, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Penelitian terdahulu mengangkat judul skripsi "Pola Relasi Antara Negara dengan Komunitas Relawan Jogja Timur dalam Penanggulangan Bencana Alam". Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang dilakukan Komunitas Relawan Jogja Timur (RJT) dalam penanggulangan bencana erupsi Merapi, dan bagaimana pola relasi antara negara dengan komunitas RJT dalam penanggulangan bencana erupsi Merapi (Kurniawati, 2015 : 8).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada tahapan-tahapan pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa saat pra bencana, RJT bekerjasama dengan lembaga formal dan lembaga komunitas kemanusiaan lain untuk mengadakan pelatihan dan peningkatan life skill kepada anggotanya dan berkoordinasi dengan BPBD Sleman dan TAGANA dalam menanggulangi bencana yang terjadi. Saat tanggap darurat, RJT ikut serta menyiapkan tempat pengungsian. Sedangkan saat pasca bencana, RJT berperan aktif dalam memantau banjir lahar dingin. Relasi yang terjalin antara RJT, BPBD Sleman dan TAGANA merupakan relasi yang saling menguntungkan, saling mendekat dan saling melengkapi (Kurniawati, 2015 : 77-78).

Penelitian terdahulu kelima berasal dari skripsi Efa Apriyani yang berjudul "Manajemen Prabencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman", Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen prabencana melalui pemberdayaan masyarakat siaga bencana berbasis komunitas di Kabupaten Sleman (Apriyani, 2013 : 12).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Sleman dalam kegiatan pemberdayaan berperan sebagai penyelenggara yang memfasilitasi seluruh kebutuhan, sedangkan komunitas peduli bencana sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Manajemen prabencana melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas telah membentuk masyarakat Sleman menjadi masyarakat siaga bencana yang mampu menganalisis tanda-tanda bencana dan berketerampilan dalam pelatihan kesiapsiagaan (Apriyani, 2013 : 148-149).

Penelitian terdahulu yang keenam dilakukan oleh Damayanti Wardyaningrum dengan judul jurnal "Perubahan Komunikasi Masyarakat dalam Inovasi Mitigasi Bencana Di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi", Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al Azhar Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan komunikasi masyarakat di wilayah rawan bencana (Wardyaningrum, Jurnal Komunikasi, Vol. 10 No.2, April 2016 : 133-152).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam mitigasi bencana membawa perubahan antara lain bentuk komunikasi kelompok, alat komunikasi yang digunakan, sikap masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah, hingga komunikasi yang menentukan pengambilan keputusan individu dalam proses evakuasi. Masyarakat kini telah aktif dalam mencari informasi sendiri, serta alat komunikasi yang digunakan telah berbeda, sebelum erupsi 2010 masyarakat mengandalkan informasi dari mulut ke mulut, sedangkan setelah erupsi 2010 masyarakat mulai mendapatkan informasi dari *handy talky* (Wardyaningrum, Jurnal Komunikasi, Vol. 10 No.2, April 2016 : 133-152).

Letak kebaruan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti ingin menggali bagaimana pola komunikasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi secara komprehensif mempertimbangkan aktor, pesan, dan media yang terlibat di dalamnya. Peneliti memilih untuk menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil dari informan yang menjadi subjek peneliti. Subjek penelitian yang peneliti ambil yaitu dari BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta, Komunitas CRI, serta kepala dukuh dan warga Huntap Dongkelsari. Peneliti mengacu pada teori yang tergolong teori baru, yaitu teori komunikasi bencana.

1.5.2 Kerangka Teori

a. Pola Komunikasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pola adalah sistem; cara kerja; bentuk (struktur) yang tetap (*http://kbbi.web.id/pola*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 20.15 WIB). Sedangkan dalam KBBI pula, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (*http://kbbi.web.id/komunikasi*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 21.20 WIB).

Menurut Djamarah (2004), pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis (Effendy, 1989).

Tubbs dan Moss (2001), mengemukakan bahwa pola komunikasi adalah hubungan yang diciptakan oleh

komplementaris atau simetri. Dalam komplementaris, satu bentuk perilaku akan diikuti oleh lawannya. Dalam simetri, tingkatan sejauh mana orang berinteraksi atas dasar kesamaan, seperti dominasi bertemu dengan dominasi, atau kepatuhan dengan kepatuhan.

Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto, 2001).

Dalam pola komunikasi ini, peneliti menggunakan model pola komunikasi Stephen P. Robbins yang dikemukakan dalam bukunya, *Organization Behaviour: concepts, controversies and applications*. Second Edition, Prentice-Hall, inc., Englewood Cliffs, New Jersey (1983). Adapun terdapat lima model pola komunikasi dalam model komunikasi Robbins, yaitu model rantai (*chain*), model roda (*wheel*), model lingkaran (*circle*), model bebas (*all channel*), dan model huruf "*Y*" (Rosady, 1998 : 94).

Model rantai (*chain*) adalah model yang memiliki lima tingkatan dalam jenjang hirarkisnya dan hanya dikenal sebagai sistem komunikasi arus ke atas (*upward*) dan ke bawah (*downward*). Model ini menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando), baik ke atas maupun ke bawah tanpa terjadi suatu persimpangan (Rosady, 1998 : 94).

Model roda (*wheel*) adalah model pola komunikasi yang menjadikan semua laporan, instruksi, perintah kerja dan kepengawasan terpusat pada satu orang pemimpin dengan empat atau lebih bawahan dan tidak terjadi interaksi atau komunikasi antara bawahan yang satu dengan bawahan yang lainnya (Rosady, 1998 : 94).

Model lingkaran (*circle*) adalah model dimana semua anggota dan stafnya dapat terjadi interaksi pada setiap tiga tingkatan hirarki. Namun, tidak ada kelanjutan pada tingkatan

yang lebih tinggi, dan hanya terbatas pada setiap level. Seperti komunikasi yang terjadi secara interaksi antar sesama bawahan dengan atasannya langsung (komunikasi berjenjang) (Rosady, 1998 : 94).

Model bebas (*all channel*) adalah model pengembangan dari model lingkaran (*circle*). Pada model ini, semua tingkatan dalam jaringan tersebut dapat melakukan interaksi timbal balik tanpa melihat siapa yang menjadi tokoh utamanya. Semua jaringan komunikasi antar tingkatan jenjang hirarkinya tidak dibatasi dan semua staf bawahan bebas melakukan interaksi dengan berbagai pihak atau pimpinan, begitu juga sebaliknya (Rosady, 1998 : 94).

Model huruf "*Y*" adalah model pola komunikasi yang tidak jauh berbeda dengan model rantai (*chain*), dimana terdapat level jenjang hirarki (Rosady, 1998 : 94).

b. Penanggulangan Bencana

Menurut Susanto (2011 : 87), bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat faktor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, teror bom, dan lain-lain.

Adapun siklus-siklus erupsi Gunung Merapi yakni siklus pendek dua sampai lima tahun, siklus menengah lima sampai tujuh tahun, dan siklus panjang hingga 100 tahun (Surono, Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 241-242, Oktober 2012 : 121-135).

Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5 tentang Penanggulangan Bencana adalah :

1. *Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban*

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. *Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.*
3. *Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.*
4. *Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.*
5. *Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi* (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1, ayat 1-5).

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana juga terbagi atas tiga tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dimana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 34 menyatakan bahwa prabencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 disebutkan bahwa dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 menyatakan bahwa saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber

daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindugan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Dan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 57 menyatakan bahwa pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Komunikasi bencana pada dasarnya mengikuti tahap-tahap penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

a) dalam situasi tidak terjadi bencana; meliputi : perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35).
b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 44).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

a) rehabilitasi; seperti pemulihan-pemulihan sarana dan prasarana umum, psikologi dan kesehatan masyarakat, hingga fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 58).
b) rekonstruksi; seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, pembangkitan kehidupan sosial masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik khususnya masyarakat (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 59).

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Pasal 4 bagian c mengatakan bahwa pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana Gunung Merapi.

Rencana penerapan program *sister village* pada suatu wilayah dilakukan kajian secara fisik dan sosial. Secara fisik diperlukan penentuan desa-desa penerima untuk desa-desa rawan, sedangkan secara sosial dilakukan kajian terhadap respon masyarakat untuk rencana penerapan program *sister village* (Astriani, 2017 : 3).

c. Komunikasi Bencana

Secara umum, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam komunikasi, pengirim pesan mengharapkan adanya timbal balik atau respon dari penerima pesan. Selain itu, komunikasi melibatkan pengirim dan penerima pesan untuk membahas pokok pesan yang disampaikan. Sehingga, sebagai penerima pesan tentu mendapatkan pengaruh dari pesan yang ia peroleh.

Berkaitan dengan bencana, komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Dalam hal ini, komunikasi dikhususkan pada kegiatan pra bencana yang meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Seperti memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapan diadakan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, kesiagaan yang diperlukan dan persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi adanya korban jiwa dan kerugian harta benda (Swandewi, https://www.scribd.com/doc/283167346/Manajemen-Sistem-Informasi-Dan-Komunikasi-Dalam-Bencana#, diakses pada tanggal 22 September 2017 pukul 19.09).

Peran komunikasi tentu berbeda-beda di setiap kondisinya. Seperti komunikasi dalam bencana tidak hanya diperlukan dalam kondisi darurat bencana atau tanggap darurat saja, melainkan pada saat pra bencana dan pasca bencana juga.

Dalam jurnal (Nurdin, Jurnal Simbolika, No.1, April 2015 : 51-61) mengatakan bahwa selain informasi mengenai adanya potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan pada saat pra bencana.

Menurut (Nurdin, Jurnal Simbolika, No.1, April 2015 : 51-61), pada saat tanggap darurat komunikasi sangat dibutuhkan sebagai fungsi manajemen dan koordinasi antara pemerintah, korban, masyarakat, relawan, dan media massa untuk informasi kondisi terkini.

Pada saat pasca bencana, (Nurdin, Jurnal Simbolika, No.1, April 2015 : 51-61) mengatakan bahwa pada masa rehabilitasi ini, komunikasi berperan sangat penting untuk mengembalikan masyarakat korban bencana pada kondisi kehidupan normal. Seperti melakukan konseling, pemberdayaan sosial ekonomi, dan

pengembalian kehidupan sosial masyarakat merupakan kegiatan yang sangat membutuhkan pemahaman komunikasi yang baik. Sedangkan rekonstruksi sosial dapat dilakukan dengan merekayasa komunikasi sosial dan lintas budaya yang setara diantara sesama masyarakat korban bencana.

Komunikasi bencana sangat penting untuk penanganan darurat yang efektif. Baik media tradisional maupun media baru memainkan peran penting dalam komunikasi bencana. Menurut (Davis dan Kapur, International Journal of Emergency Medicine, Maret 2014 : 1-7), setiap bencana berfungsi sebagai kesempatan belajar bagaimana berkomunikasi lebih baik pada bencana berikutnya. Kesenjangan dalam rencana komunikasi bencana seperti instruksi teknis atau kompleks dapat membuat kelompok rentan terhadap kesalahpahaman.

Lestari (dalam Budi (Ed.) 2011 : 99) menyatakan bahwa koordinasi penting untuk menghindari kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan bantuan dan kekeliruan penafsiran kondisi.

Becker (2011) dalam (Davis dan Kapur, International Journal of Emergency Medicine, Maret 2014 : 1-7), komunikasi bencana telah dikritik karena kesiapsiagaan komunikasi masih terbelakang. Mackway dan Carley (2012) dalam (Davis dan Kapur, International Journal of Emergency Medicine, Maret 2014 : 1-7), seorang ahli dari *delphi study* menyatakan masih kurangnya pemahaman tentang komunikasi, mengidentifikasi komunikasi sebagai prioritas utama untuk penelitian manajemen bencana lebih lanjut.

Buckland dan Rahman, 1999; Pearce, 2003; Allen, 2006; Hosseini et al. dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, Journal Science Direct, Part B, Agustus 2016 : 235-243) mengatakan bahwa, untuk mengurangi jumlah korban bencana, promosi evakuasi dini, pendidikan tentang pencegahan bencana, dan pembentukan sistem dimana warga dapat mengungsi dengan

kemauan sendiri adalah suatu hal yang penting. Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan pengurangan risiko atau manajemen bencana menantang di negara-negara dengan struktur pemerintahan dan pemerintahan *top-down*.

Menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat dapat membangun sistem evakuasi sukarela berbasis masyarakat dan jaringan pencegahan bencana sebelum situasi bencana yang sebenarnya terjadi

Hosseini dkk. (2014) dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, Journal Science Direct, Part B, Agustus 2016 : 235-243) menunjukkan bahwa tindakan tanggap darurat untuk bencana besar tidak dapat dilaksanakan tanpa memobilisasi masyarakat lokal. Mereka juga menyoroti pentingnya kegiatan berbasis masyarakat dalam mengurangi risiko bencana dan mengevaluasi kemungkinan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko. Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa kegiatan yang tidak melibatkan cukup komunikasi antar penduduk setempat sulit dilaksanakan dalam jangka pendek dan dianggap tidak realistis. Namun, setelah menyediakan materi yang relevan, seperti peta atau rencana bencana, masyarakat menemukan cara baru untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam mengurangi risiko bencana dan merespons bencana dengan benar. Selain itu, Hosseini dkk. (2014) dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, Journal Science Direct, Part B, Agustus 2016 : 235-243) menemukan bahwa semua peserta, terutama generasi muda, memiliki sikap yang lebih fleksibel terhadap manajemen bencana di masyarakat setempat.

Mushkatel dan Weschler (1985) dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, Journal Science Direct, Part B, Agustus 2016 : 235-243) menyatakan bahwa tata kelola manajemen darurat harus dibagi di berbagai tingkat pemerintahan dan di antara berbagai sektor, sehingga mengurangi beban pada satu agensi tunggal.

Selain itu, kapasitas lokal dan masyarakat harus ditingkatkan, karena manajemen darurat metropolitan beroperasi terutama pada tingkat ini.

Perilaku warga negara dan kelompok yang muncul tidak terbatas pada upaya individu dalam tanggap bencana (Kapucu, 2013). Sebaliknya, kegiatan berbasis masyarakat berdasarkan inisiatif warga memainkan peran penting dalam berbagai aspek pencegahan bencana. Inisiatif ini tidak hanya dilibatkan dalam upaya kesiapsiagaan dan respons, namun juga memberikan dukungan finansial dan layanan medis (misalnya menyumbang darah) setelah terjadinya bencana (Kapucu, 2013; Stallings and Quarantelli, 1985).

Menurut (Pearce, Journal Natural Hazard, Issue 2-3, Maret 2003 : 211-228), saat memeriksa hubungan antara manajemen bencana dan perencanaan masyarakat, dua jenis fenomena harus dipertimbangkan: (1) merencanakan kegiatan yang terjadi sebelum bencana (yaitu, mitigasi), dan (2) kegiatan yang terjadi selama atau setelah bencana. Kegiatan mitigasi terjadi pada semua tahapan pengelolaan bencana dan biasanya kondusif untuk kerjasama dan koordinasi antara pengelola bencana dan perencana masyarakat. Misalnya, sebagian besar masyarakat memiliki rencana resmi yang merencanakan kemajuan dan pembangunan masa depan mereka. Diskusi seputar rencana ini harus mencakup pengelola bencana lokal dan juga perencana masyarakat. Hal ini sangat penting berkaitan dengan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas penting lainnya. Seiring masyarakat memperbaiki infrastruktur yang ada, pengelola bencana dan perencana masyarakat harus terlibat langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian deskriptif yang mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu.

1.6.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini peneliti lakukan dalam kurung waktu 10 bulan (Maret 2017 – Desember 2017). Berlokasi di kawasan rawan bencana Gunung Merapi, tepatnya di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, Pemerintah Desa Kepuharjo, *Combine Resource Institution* (CRI), dan hunian tetap Dongkelsari.

1.6.3 Narasumber atau Informan Penelitian

Narasumber atau informan dalam penelitian ini yang peneliti ajukan ada tiga tipe, yaitu pemerintah, komunitas relawan, dan masyarakat. Dari pihak pemerintah ada empat, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, Staff Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta, Kepala Pemerintah Desa Kepuharjo, dan Kepala Dukuh Hunian Tetap Dongkelsari. Dari komunitas relawan ada satu, yaitu CRI. Dari masyarakat ada empat warga dari Hunian Tetap Dongkelsari. Alasan peneliti memilih tiga tipe ini, karena menurut peneliti ketiga tipe inilah yang ikut berpartisipasi dalam penyebaran informasi kebencanaan di Gunung Merapi.

1.6.4 Pengumpulan Data

Burhan Bungin (2003 : 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan

informasi yang valid dan reliable. Teknik yang dipilih dalam pengumpulan data harus sesuai dengan jenis penelitian agar mendapatkan data yang akurat dan sesuai. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dikelompokkan menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari tangan pertama atau penulis. Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan subjek sebagai sumber yang dicari (Sugiyono, 2013 : 308-309).

a. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data melalui observasi ini, peneliti memfokuskan beberapa hal dalam pengumpulan data, diantaranya adalah menyesuaikan dengan tujuan penelitian, perencanaan secara sistematis seperti daftar pertanyaan dan narasumber yang akan diwawancarai, serta mengontrol secara rehabilitas dan validitas data yang peneliti peroleh. Lokasi penelitian juga menjadi salah satu pengamatan peneliti sebelum menentukan dan melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

b. Wawancara

Peneliti memilih orang-orang yang berkaitan dan berkompeten langsung tentang penerapan pola komunikasi. Hal ini berdasarkan pertimbangan peneliti agar tidak menyimpangnya pembahasan wawancara dari penelitian yang peneliti angkat, maka dari itu peneliti menggunakan wawancara secara pribadi dan terstruktur dengan bantuan kerangka pertanyaan yang telah peneliti siapkan sesuai kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka pertanyaan juga membantu untuk menggali pertanyaan-pertanyaan tentang keobyektifan sesuatu yang diteliti dengan pembicaraan yang tidak kaku. Adapun yang menjadi narasumber peneliti adalah sebagai berikut.

1) Heru Saptono, S.TP., MM sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman.

2) Noer Cholik sebagai Staff Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta.
3) Heri Suprapto sebagai Kepala Pemerintah Desa Kepuharjo.
4) Totok Sondong Hartanto sebagai Kepala Dukuh Huntap Dongkelsari.
5) Muhammad Amrul sebagai Staff Pengembangan Lumbung Komunitas dan Pengelola Manajemen Informasi Bencana CRI Yogyakarta.
6) Windarwati sebagai Ketua PKK dan warga huntap Dongkelsari.
7) Maryam sebagai warga huntap Dongkelsari.
8) Suprapto sebagai warga huntap Dongkelsari.
9) Is Lestari sebagai warga huntap Dongkelsari.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang bersangkutan dengan pola komunikasi. Peneliti menggunakan pengumpulan dekomentasi secara acak, dimana sumber dokumentasi ini dari mana saja. Sebagian besar dokumentasi yang peneliti peroleh adalah dari para narasumber guna memenuhi kebutuhan untuk keabsahan data penelitian ini.

1.6.5 Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong, 2001 : 103), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dari segi

tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

a. Reduksi Data

Peneliti menganalisis dan memilah-milah data yang telah peneliti peroleh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian, peneliti sisihkan dan hanya berfokus pada data-data yang berkaitan dengan penelitian.

b. Display Data

Pada display data, peneliti membuat teks narasi berdasarkan data-data yang telah direduksi. Tidak hanya berupa teks deskriptif, peneliti juga merumuskan data dalam bentuk bagan.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan tahap reduksi data dan display data, maka peneliti dapat merumuskan data dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan ini menjadi temuan baru dari temuan-temuan penelitian sebelumnya dengan rumusan masalah yang tentunya berbeda.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

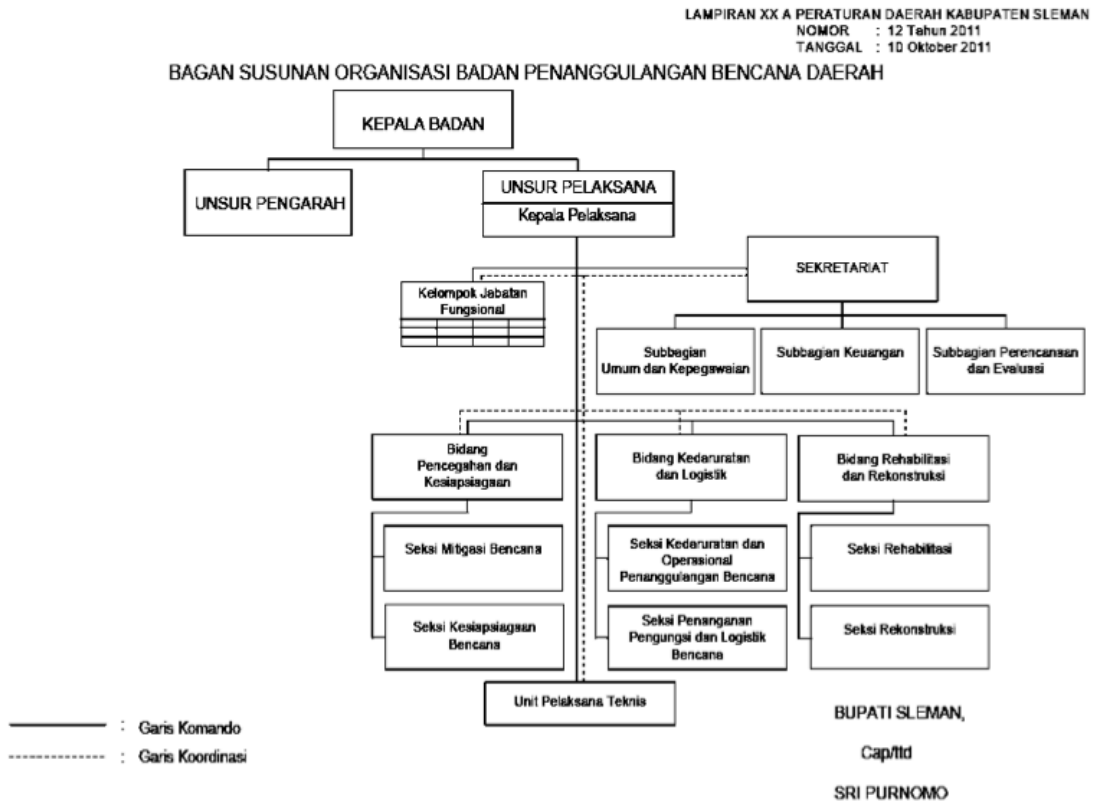
2.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman adalah badan penanggulangan bencana daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011. BPBD Sleman merupakan salah satu unit pelaksana teknis penanggulangan bencana yang terjun ke lapangan setelah memperoleh rekomendasi dari unsur pengarah penanggulangan bencana (*http://bpbd.slemankab.go.id/*, diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 19.17 WIB).

BPBD Sleman sebagai unit pelaksana teknis penanggulangan bencana daerah ini dipimpin dan dijabat oleh Sekretaris Daerah secara *ex-officio* (jabatan pada lembaga tertentu karena memiliki wewenang dari lembaga lain). Sekda ini berada di bawah tanggungjawab Bupati. BPBD Sleman memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tugas dan fungsi BPBD Sleman adalah sebagai berikut.

1. *Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana,*
2. *pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana,*
3. *pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana,*
4. *pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana,*
5. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya* (*http://bpbd.slemankab.go.id/*, diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 19.29 WIB).

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman dimulai dari Kepala Badan yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Unsur Pelaksana yaitu Joko Supriyanto, Sekretaris yaitu Asih Kushartati, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu Heru Saptono, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Makwan, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu Taupiq Wahyudi. Struktur organisasi BPBD Yogyakarta ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPBD Sleman

(sumber: Website resmi BPBD Sleman http://bpbd.slemankab.go.id/) diakses tanggal 17 Juli 2017 pukul 19.35 WIB)

2.2 Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 beralamatkan di Jalan Cendana Nomor 15 Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas utama BPPTKG Yogyakarta adalah melakukan mitigasi, penelitian, penyelidikan Gunung Merapi, dan mengelola laboratorium geologi (*http://merapi.bgl.esdm.go.id*, diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 20.05 WIB).

Selain tiga tugas utama di atas, BPPTKG Yogyakarta juga memiliki beberapa fungsi lain, diantaranya adalah menyusun rencana dan program,

mengelola informasi kebencanaan di Gunung Merapi, memberikan informasi adanya status dan aktivitas Gunung Merapi, dan mengelola serta melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga (*http://merapi.bgl.esdm.go.id*, diakses pada tanggal 17 Juli 2017, pukul 20.12 WIB).

Struktur organisasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta dimulai dari Kepala BPPTKG Yogyakarta yaitu I Gusti Made Agung Nandaka, Kepala Subbagian Tata Usaha yaitu Kusdaryanto, Kepala Seksi Gunung Merapi yaitu Agus Budi Santoso, Kepala Seksi Metoda dan Teknologi yaitu Nurudin, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPPTKG Yogyakarta ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 2.2 Struktur Organisasi BPPTKG Yogyakarta
(sumber: Website Resmi BPPTKG Yogyakarta http://merapi.bgl.esdm.go.id/, diakses tanggal 17 Juli 2017 pukul 20.18 WIB)

2.3 *Combine Resource Institution* (CRI) Yogyakarta

Combine Resource Institution merupakan sebuah organisasi nirlaba, non pemerintah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Combine* sendiri adalah singkatan dari *community based information network*. Dimana dasar organisasi ini sebagai sebuah kelembagaan sumber daya yang memilih strategi penguatan komunitas marjinal melalui jaringan komunikasi.

Sebagai salah satu media lokal, radio komunitas berperan penting dalam meneruskan informasi supaya komunikasi dapat berlangsung dua arah. Dengan adanya radio komunitas ini juga dapat memposisikan diri sebagai mediator yang secara rutin mengelola dan menginformasikan pendidikan kebencanaan melalui siarannya, khususnya radio komunitas yang berada di sekitar Gunung Merapi atau di kawasan rawan bencana. Materi penanggulangan bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami dan tanah longsor disiarkan melalui radio komunitas sebagai bentuk pendidikan maupun informasi tanggap darurat kebencanaan (*http://combine.or.id/*, diakses pada tanggal 18 Juli 2017, pukul 08.23 WIB).

Disini CRI berperan mengorganisasikan kegiatan penerapan uji coba dan pengembangan materi audio kebencanaan di Indonesia. Hingga saat ini CRI juga memberi dukungan kepada komunitas, pemerintah dan masyarakat yang dinilai memiliki perhatian terhadap informasi dan komunikasi di beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Tmur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (*http://combine.or.id/*, diakses pada tanggal 18 Juli 2017, pukul 08.33 WIB).

2.4 Hunian Tetap (huntap) Dongkelsari

Hunian tetap Dongkelsari merupakan sebuah tempat atau wilayah relokasi korban erupsi Gunung Merapi 2010 dari Dusun Gungan Srodokan yang saat ini berada di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta (*http://wukirsari-sleman.sid.web.id*, diakses pada tanggal 18 Juli 2017, pukul 10.02 WIB).

Jumlah penduduk hunian tetap Dongkelsari Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman adalah sebanyak 757 jiwa yang terdiri dari 372 orang penduduk laki-laki dan 385 orang penduduk perempuan yang terbagi dalam 231 kepala keluarga (*http://wukirsari-sleman.sid.web.id*, diakses pada tanggal 18 Juli 2017, pukul 10.02 WIB).

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

3.1 Pengalaman Erupsi Gunung Merapi 2010

Setiap masyarakat pasti memiliki pengalaman masing-masing terkait letusan besar erupsi Gunung Merapi 2010 lalu. Setiap kenangan dan pengalaman yang dirasakan masyarakat menjadi pelajaran tersendiri untuk menghadapi bencana-bencana serupa ke depannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari informan yang merupakan warga hunian tetap Dongkelsari terdiri dari 4 orang yang menyediakan waktu untuk berbagi cerita pengalaman serta pola komunikasi ke masyarakat yang terjadi saat erupsi Gunung Merapi 2010. Pengalaman masyarakat dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pengalaman saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

3.1.1 Pengalaman Saat Pra Erupsi Gunung Merapi 2010

Peneliti menemukan bahwa pada saat pra bencana, 25 Oktober 2010 sampai 4 November 2010, tidak terdapat koordinasi atau arahan dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat hanya saling berkoordinasi untuk bersiap-siap mengungsikan diri. Rata-rata warga mengungsikan diri ke Koroulon hingga pada saat tanggap darurat. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa masyarakat yang sempat membawa pakaian dan surat-surat berharga seperti yang BPPTKG dan BPBD sampaikan saat melakukan pelatihan dan mitigasi bencana. Namun, terdapat pula masyarakat yang enggan untuk mengungsi dengan alasan hewan ternaknya tidak ikut diungsikan. Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan warga di hunian tetap Dongkelsari mengenai pengalaman saat pra bencana.

Windarwati, ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), saat pra bencana menceritakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 ia mendapatkan adanya eskalasi status Gunung Merapi dari media

televisi dan dari komunitas Pasag Merapi melalui Totok yang saat itu sebagai relawan. Informasi yang Windarwati peroleh berupa tahapan-tahapan status Gunung Merapi yang tadinya siaga menjadi awas, sehingga ia dan warga lain sudah bersiap-siap untuk mengungsi.

> "Sejak tanggl 25 itu sudah ada berita di televisi, dari temen-temen Pasag Merapi juga. Makanya kan kita juga udah siap-siap", (wawancara Windarwati, Minggu 7 Mei 2017).

Kemudian mulai tanggal 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mulai beraktifitas penuh baik gempa besar maupun gemba kecil. Warga pun saling berkoordinasi, karena tidak adanya koordinasi dari pemerintah saat itu. Hingga pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 pukul 9 pagi, Windarwati bersama beberapa warga yang lain memutuskan untuk meninggalkan rumah dan mulai menjauh dari Gunung Merapi karena situasi Gunung Merapi yang semakin memburuk dan menakutkan. Ia pergi ke daerah Koroulon dan berada disana hingga malam dengan alasan tidak berani lagi untuk pulang.

> "Keadaannya sudah menakutkan gitu ya, saya dan temen-temen pergi ke daerah Koroulon sampai sore, sampai malam pun tetap disana karena sudah tidak berani pulang", (wawancara Windarwati, Minggu 7 Mei 2017).

Pada tanggal yang sama, Is, warga hunian tetap Dongkelsari, juga langsung dijemput oleh suaminya di pabrik garmen Jalan Balong tempatnya bekerja untuk pergi mengungsi di pendopo yang ada di balai perikanan. Is mengaku tidak sempat pulang sehingga tidak membawa apa-apa.

> "Dari pabrik langsung ngungsi mbak, gak pulang dulu, jadi gak bawa apa-apa", (wawancara Is, Minggu 7 Mei 2017).

Tak hanya Is, Suprapto yang saat itu berprofesi sebagai tata usaha di SMK Muhammadiyah Cangkringan, mengatakan bahwa pada saat hari Kamis siang ia sedang di rumah lalu dijemput oleh anaknya untuk segera meninggalkan rumah. Namun Suprapto belum mau untuk pergi dengan alasan ia ingin memberi makan hewan ternaknya. Setelah mendapatkan sedikit rumput untuk pakan hewan ternaknya, anaknya kembali lagi menghampiri Suprapto dan dipaksa untuk pergi ke tempat pengungsian di Koroulon.

> "Anak saya bilang pak mbok ayo lungo, konco-konco wes kabeh lungo, saiki aku nek nggolek pakan kambing saya bilang", (wawancara Suprapto, Minggu 7 Mei 2017).

Saat tiba di Koroulon, Suprapto diberikan nasi bungkus oleh pihak kelurahan Ngemplak lalu ia makan bersama keluarganya. Tak lama kemudian, Suprapto mengaku pulang kembali ke rumah pukul setengah 5 sore untuk memberi pakan hewan ternaknya lalu kembali ke Koroulon. Pukul 9 malam ia pulang lagi dengan niat mengambil barang-barang di rumahnya, namun saat masuk ke dalam rumah Suprapto merasa tidak bisa berpikir apa-apa lagi karena situasi dan keadaan yang semakin buruk, sehingga ia kembali ke pengungsian tanpa membawa apa-apa.

> "Masuk rumah hanya masuk rumah tok, sudah tidak bisa mikir apa-apa lagi. Pokoknya sudah tanda-tanda mau meletus", (wawancara Suprapto, Minggu 7 Mei 2017).

Berbeda dengan Maryam, warga hunian tetap Dongkelsari, ia sudah pergi meninggalkan rumah sejak hari Rabu tanggal 3 November 2010. Maryam pergi ke tempat saudaranya yang tinggal dekat bandara Adisucipto Yogyakarta bersama suaminya. Paling tidak, Maryam dan suaminya sempat membawa beberapa potong pakaian dan surat-surat

berharga, seperti yang disarankan BPPTKG atau BPBD saat dulu ia mengikuti pelatihan mitigasi bencana.

> "Beberapa potong pakaian masih bawa dan surat-surat juga karena mbah kakung (suaminya) orang agak teliti", (wawancara Maryam, Minggu 7 Mei 2017).

Sebenarnya Windarwati mengaku sering juga diberitahukan untuk membawa surat-surat berharga saat akan mengungsi saat status Gunung Merapi sudah dinyatakan awas. Namun Windarwati tidak merasa bahwa erupsi yang akan terjadi tidak akan sampai di daerah tempatnya tinggal, sehingga tidak kepikiran untuk menyiapkan apa saja yang perlu dibawa jika memang harus mengungsi.

> "Beberapa puluh tahun saja orang tua kita bahkan kakek buyut kita aja belum pernah cerita kalo Merapi itu sampai di daerah sini, makanya ya kita agak menyepelekan gitu", (wawancara Windarwati, Minggu 7 Mei 2017).

3.1.2 Pengalaman Saat Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi 2010

Pada sub bab ini peneliti menemukan bahwa letusan besar Gunung Merapi, Jum'at 5 November 2010, terjadi pada pukul 00.00 WIB dini hari. Letusan besar tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tidak adanya koordinasi di tempat pengungsian Koroulon saat letusan terjadi, sehingga masyarakat berlarian mencari tempat aman tanpa mengetahui arah dan tujuan mereka kemana untuk tempat pengungsian selanjutnya. Selain itu, sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk mengungsi mandiri, baik di tempat kerabat maupun sanak saudaranya, dengan alasan masyarakat merasa lebih nyaman mengungsi di tempat keluarga dibandingkan di tempat pengungsian yang telah disediakan.

Sesaat menjelang erupsi Gunung Merapi 2010 terjadi, Suprapto yang saat itu sedang memasak mie instan dikejutkan oleh orang-orang

yang berlarian yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Karena panik, Suprapto sekeluarga ikut lari tanpa tahu arah dan tujuan mereka kemana. Ia melarikan diri mencari tempat aman hingga ke kawasan Tirtomartani di Kaliurang. Suprapto berada disana saat erupsi terjadi hingga dijemput oleh saudaranya setelah subuh untuk pergi mengungsi di Solo.

> "Ya saya sekeluarga apa ya istilahnya asal kabur, pokoknya kita cari aman saja sampai Kaliurang Tirtomartani kawasan itu", (wawancara Suprapto, Minggu 7 Mei 2017).

Tak jauh berbeda dengan Suprapto, pada saat erupsi Gunung Merapi pukul 00.00 hari Jum'at dini hari tanggal 5 November 2010, Is pindah juga ke Tirtomartani sampai Jum'at pagi. Ia tidak menyangka bahwa letusan besar itu mengahabisi rumahnya. Akhirnya Is juga menghubungi adiknya yang tinggal di Solo untuk menjemputnya dan tinggal sementara di rumah adiknya.

> "Malam Jum'atnya itu terus paginya udah tau rumahnya habis. Saya menelepon adik saya yang rumahnya di Solo, telepon terus dijemput ke Solo", (wawancara Is, Minggu 7 Mei 2017).

Saat erupsi Gunung Merapi terjadi tengah malam, Windarwati merasa tidak siap untuk mengungsi karena letusan besar yang terjadi secara tiba-tiba serta tidak adanya koordinasi di tempat pengungsian Koroulon.

> "Tau-tau tengah malam ternyata jadilah yang erupsi besar itu. Jadi kita gak siap untuk ngungsi, itupun juga tidak dikoordinasi", (wawancara Windarwati, Minggu 7 Mei 2017).

Sedangkan Maryam, ia dan keluarga sudah pergi mengungsi terlebih dahulu di tempat saudaranya di dekat bandara Adisucipto Yogyakarta.

> "Ya sepisanan ya mbak ikut sodara di bandara, di bandara 2 malam 1 hari", (wawancara Maryam, Minggu 7 Mei 2017).

Pada saat tanggap darurat, warga huntap Dongkelsari sebagian besar lebih memilih untuk mengungsi sendiri seperti di tempat sanak saudara mereka yang tinggal jauh dari Gunung Merapi daripada ikut di tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah.

> "Ya kan ada di tempat sodara yang jauh dari Merapi, kan lebih enak", (wawancara Is, Minggu 7 Mei 2017).

3.1.3 Pengalaman Saat Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa pada saat pasca bencana, masyarakat yang terkena dampak Gunung Merapi 2010, tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti dimulai dari rumah sanak saudara, Aksi Cepat Tanggap (ACT) Gondang Legi, *shelter* atau hunian sementara (huntara), hinggal akhirnya pindah dan menetap di huntap Dongkelsari. Waktu yang dibutuhkan sejak tanggap darurat hingga dibangunnya huntap adalah sekitar kurang lebih 2 tahun.

Setelah erupsi Gunung Merapi 2010 terjadi, warga huntap Dongkelsari masih mengungsi sembari menunggu adanya hunian sementara (huntara) yang dibuat pemerintah untuk warga yang kehilangan tempat tinggal akibat erupsi.

Is yang waktu itu mengungsi di Solo mengatakan hanya mengungsi sekitar 1 minggu kemudian ia pindah ke tempat orang tuanya di Donoharjo. Is mengaku lama tinggal di Donoharjo, kemudian pindah ke ACT Gondang Legi sembari menunggu jadinya

shelter. Selama mengungsi di rumah ibunya, Is juga sudah mulai aktif bekerja lagi seperti biasa di pabrik garmen balong.

> "Di Donoharjo saya udah bekerja di pabrik itu, terus saya pindah ke ACT Gondang Legi", (wawancara Is, Minggu 7 Mei 2017).

Sedikit berbeda dengan Suprapto, ia mengungsi di Solo selama 1,5 bulan. Setelah itu ia mendapat kabar bahwa aktifitas SMK Muhammadiyah Cangkringan dipindahkan ke SMP Muhammadiyah 2 yang berada di Kalasan. Selama kurang lebih 2 bulan Suprapto bolak-balik dari Solo ke Kalasan untuk mengikuti aktifitas sekolah.

> "Aktifitas sekolahan pindah ya selama 2 bulan atau berapa gitu saya laju dari sana", (wawancara Suprapto, Minggu 7 Mei 2017).

Pengalaman Windarwati dan Maryam selama mengungsi memiliki persamaan. Keduanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dimulai dari rumah sanak saudara, ACT Gondang Legi, shelter atau huntara, hingga pindah dan menetap di huntap Dongkelsari.

> "Ngungsi di tempat sodara terus pindah ke shelter Gondang Legi dari ACT itu, baru ada berita mau dibikinkan shelter", (wawancara Windarwati, Minggu 7 Mei 2017).

3.2 Otoritas Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

3.2.1 Kewajiban Pemerintah

Berdasarkan hasil di lapangan, peneliti menemukan data mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 pasal 4 huruf (a). Bentuk perlindungan yang dimaksud pun bermacam-macam dari data informan dalam penelitian ini.

Heru Saptono, ketua bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Sleman, menyatakan bahwa perlidungan yang dimaksud yaitu sama seperti amanat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan negera Republik Indonesia.

> "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", (UUD 1945 Pasal 28G).

Pasal di atas merupakan pasal yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk diberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Heru menyatakan bahwa bentuk perlindungan masyarakat dari ancaman bencana adalah dengan memberikan informasi mengenai kebencanaan dan menyadarkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

> "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam rangka melindungi masyarakatnya dari ancaman bencana, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama informasi mengenai ancaman bencana ini harus sampai ke masyarakat, kedua masyarakat harus menyadari mereka tinggal di kawasan rawan bencana", (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

Namun menurut Heru, masyarakat sulit untuk dievakuasi bagi yang tinggal di kawasan rawan bencana, maka hal yang harus dilakukan adalah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana yaitu *living in harmony with threat disaster*. Dengan ini, masyarakat harus mengetahui ancaman bencana seperti apa yang kemungkinan akan dihadapi dan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terdapat adanya potensi bencana.

Berbeda dengan Totok, selaku dukuh huntap Dongkelsari. Dia menyatakan bahwa perlindungan rasa amanlah yang perlu diberikan kepada masyarakat yang berbentuk lebih ke kebijakan-kebijakan perlindungan. Karena sebagian besar profesi masyarakat di kawasan rawan bencana adalah bertani. Dengan begitu, masyarakat juga sudah mulai belajar tentang kebencanaan, bahkan sudah mengetahui bagaimana pengurangan resiko bencana.

> "Yo perlindungan yang rasa aman, sebenarnya rasa aman toh dari bencana", (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Dalam hal ini, banyak masyarakat yang merasa bahwa hidup nyaman tidak berarti hidup aman. Sebab banyak masyarakat yang merasa nyaman di kampungnya yang merupakan bekas dampak erupsi Gunung Merapi. Walaupun masyarakat tersebut mengetahui bahwa kawasan tersebut tidak aman, namun karena merasa nyaman masyarakat tetap tinggal di sana. Totok juga mengaku bahwa orang tuanya merupakan salah satu masyarakat yang masih tinggal di kampung bekas erupsi Gunung Merapi 2010.

Peneliti menemukan bahwa bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat berupa sampainya informasi bencana kepada masyarakat dan juga memberikan rasa aman dari bencana kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat merasa aman dan nyaman tanpa memaksa masyarakat untuk tinggal di tempat aman, yang terpenting adalah selalu menginformasikan apabila terdapat potensi ancaman bencana dan dimana masyarakat tersebut harus mengungsikan diri.

3.2.2 Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti berusaha menggali pola komunikasi dari pemerintah ke masyarakat mengenai informasi kebencanaan Gunung Merapi. Sebelum membahas pola komunikasi,

peneliti ingin membahas tentang siapa yang bertanggungjawab mempublikasikan informasi kebencanaan Gunung Merapi kepada masyarakat. Dalam hal kebencanaan, tentu BPBD yang lebih bertanggungjawab dalam mempublikasikan informasi kebencanaan. Hal ini juga disebutkan oleh Heru Saptono yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman, yang mengatakan bahwa.

> "Ya, BPBD. Di BPBD Sleman ada yang namanya struktur Pusat Pengendalian dan Operasi atau Pusdalops", (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

Struktur Pusdalops tersebut yang bertugas memberikan informasi apabila terjadi bencana maupun informasi himbauan kepada masyarakat untuk *awareness*. BPBD Sleman juga telah memiliki struktur tersendiri dalam mempublikasikan informasi kebencanaan di Gunung Merapi. Dimana BPBD Sleman mendapatkan informasi dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) yang kemudian diteruskan kepada masyarakat melalui berbagai media. Heru juga mengatakan bahwa BPBD Sleman juga memberikan ruang kepada Bupati Sleman untuk dapat menyampaikan informasi langsung ke masyarakat.

Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprapto yaitu,

> "Ya, Pak Bupati. Tapi, kenyataannya ndak begitu, biasanya itu langsung nanti dari BPBD itukan sudah punya anu nomor hpnya masing-masing kepala desa, itu langsung dari BPPTK atau BPBD", (wawancara Heri, Kamis 06 April 2017).

Hal ini menjelaskan bahwa baik BPBD Sleman maupun BPPTKG bisa menyampaikan informasi kebencanaan Gunung Merapi langsung ke perangkat desa tanpa harus melalui Bupati. Namun,

keaktifan atau kesigapan dalam mempublikasikan informasi kebencanaan antara BPBD atau BPPTKG dapat dilihat dari pernyataan Totok Sondong Hartanto sebagai Kepala Dukuh Huntap Dongkelsari, yaitu.

> "Kalo dulu biasane yo simpul warga orang neng dipercayai warga, misalnya pak dukuh. Kalo saat ini untuk Sleman itu sebetulnya kan BPBD, itu untuk kebencanaan, tapi saya rasa yo lebih secara informasi ki lebih cepat BPPTKG", (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Menurut Totok, sebelum tahun 2010 di wilayah perkampungan/pedesaan, yang bertanggungjawab dalam mempublikasikan informasi kebencanaan Gunung Merapi adalah orang yang dipercayai warga, yaitu Pak Dukuh. Namun tetap secara keseluruhan yang bertanggungjawab mempublikasikan informasi kebencanaan adalah BPBD atau BPPTKG. Tak jauh berbeda dengan Totok, Noer Cholik selaku Staff Seksi Gunung Merapi BPPTKG Yogyakarta juga menyatakan hal serupa, bahwa.

> "Kalo dalam bencana ya kita BPPTK, mungkin dengan bencana gempa untuk pengarahnya adalah BMKG. Jadi kita sebagai unsur-unsur pengarah ini hanya bisa memberi rekomendasi ke pemerintah daerah, ke BNPB", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Menurut Cholik, BPPTKG merupakan pengarah mengenai aktifitas Gunung Merapi, sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pengarah apabila terjadi cuaca ekstrim maupun bencana. Sehingga dari pengarah-pengarah inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada BNPB maupun BPBD untuk ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini tak jauh berbeda pula dari yang diungkapkan Muhammad Amrul selaku Staff Pengembangan Lumbung Komunitas dan Pengelolaan

Manajemen Informasi Bencana *Combine Resource Institution* (CRI), yakni.

> "Ya, yang bertanggungjawab harusnya pemerintah disisi ini ya, karena pemerintah adalah *stakeholder* yang utama, dalam artian mereka yang harus bertanggungjawab", (wawancara Amrul, Senin 06 Maret 2017).

Amrul juga menyatakan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab dalam mempublikasikan informasi kebencanaan, hanya saja belum maksimal. Seperti radio komunitas yang masih terbatasi regulasi, padahal menurutnya radio komunitas masih dianggap penting oleh masyarakat, khususnya untuk penyebaran informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana.

Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara peran BPPTKG dan peran BPBD. Dimana peran BPPTKG adalah sebagai fasilitator, pengarah dan pemberi rekomendasi mengenai aktifitas Gunung Merapi kepada pemerintah, seperti BNPB dan BPBD. Sedangkan BPBD berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan penyebaran informasi agar sampai kepada masyarakat. Namun, peneliti melihat bahwa peran BPPTKG tidak menutup kemungkinan juga untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi kebencanaan.

3.2.3 Penetapan Status dan Tingkatan Bencana di Gunung Merapi

Adapun kebijakan dalam menentukan standarisasi penetapan status dan tingkatan bencana itu mengacu dari BPPTKG. Apabila Gunung Merapi mengalami eskalasi status, maka BPPTKG yang diberi amanah oleh negara untuk mengamati dan BPPTKG juga telah memiliki standar menetapkan status dan tingkatan Gunung Merapi.

> "Ada, yang memiliki adalah BPPTKG. BPPTKG yang sudah punya (standar penetapan status)", (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

Untuk menentukan adanya eskalasi status dan tingkatan bencana, BPPTKG melakukan pengamatan yang ditinjau dari 4 parameter, yaitu visual; geokimia; seismik; dan deformasi. Dari hasil pengamatan itulah yang akan dianalisa kemudian ditetapkan status dan tingkatan bencana.

> "Mantau dari itu tadi, visual, geokimia, seismik, gempa atau deformasi, itu yang dianalisa", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

3.2.4 Menentukan Peta Rawan Bencana di Gunung Merapi

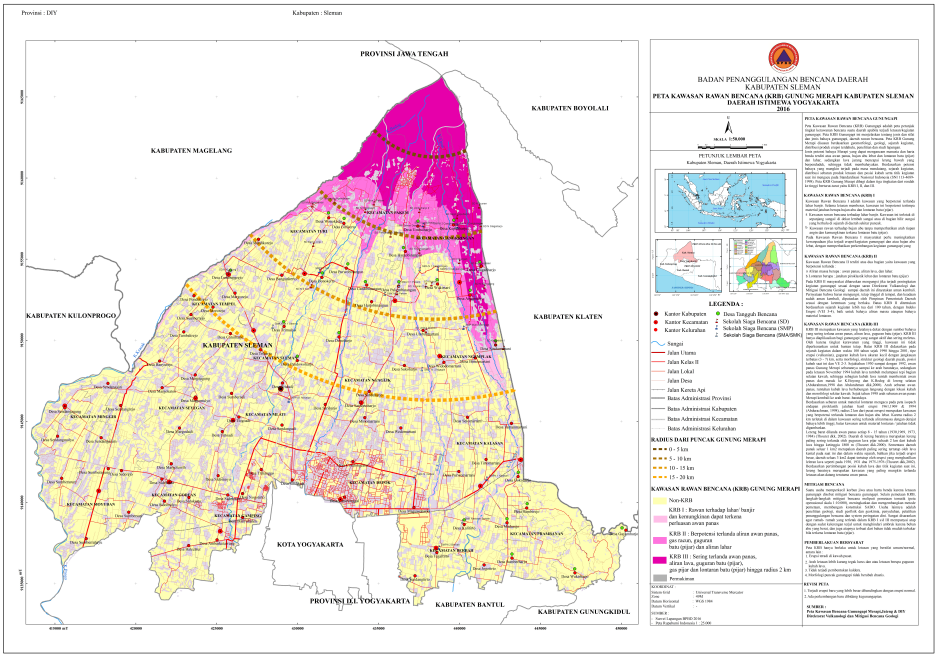
Sedangkan untuk menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, BPPTKG Yogyakarta menganggap bahwa peta kawasan rawan bencana bersifat historis. Dimana peta historis atau kawasan rawan bencana yang akan menjelaskan letusan yang pernah terjadi di Gunung Merapi. Peta tersebut tidak akan diubah apabila tidak terdapat letusan yang lebih besar dari letusan-letusan sebelumnya.

> "Nah peta KRB (kawasan rawan bencana) itu kan historis, jadi yang pernah terjadi", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Adapun untuk mendukung penyusunan peta kawasan rawan bencana, BPPTKG Yogyakarta biasanya membuat kontijensi sebagai bahan rancangan peta skenario pada saat menjelang terjadi erupsi. Peta skenario tersebut disusun dari pemodelan awan panas maupun abu dan lahar.

Sedangkan BPBD Sleman memasukkan penyusunan peta kawasan rawan bencana dalam mitigasi pada saat pra bencana. Pada peta kawasan rawan bencana tersebut, terdapat profil masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, seperti jumlah penduduk dan skema alur evakuasi apabila terjadi bencana.

"Pada saat pra bencana dimasuk dimitigasi tadi peta KRB (kawasan rawan bencana)", (wawancara Heru, 08 Maret 2017).



Gambar 3.1 Peta KRB Gunung Merapi

(sumber: BPBD Sleman)

3.3 Mitigasi Pra Bencana Gunung Merapi

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana termasuk dalam salah satu bagian program BPBD Sleman saat pra bencana dalam mitigasi non fisik sebagai bentuk upaya mengkomunikasikan ancaman bencana. Bentuk pendidikan yang BPBD Sleman berikan kepada masyarakat berbentuk klasikal selama 6 kali pertemuan. Hasil yang diharapkan dari masyarakat diantaranya adalah masyarakat mengetahui ancaman bencana dan memahami kerentanan kapasitas dan resiko.

"Kalo ke masyarakat kita klasikal, jadi ada bentuk klasikal selama 6 kali pertemuan", (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

Proses pelatihan untuk masyarakat tersebut dimulai dari membentuk tim sekolah siaga bencana, menyusun rencana kontijensi dan rencana

penanggulangan bencana, kemudian diformalisasikan ke dalam bentuk gladi. Gladi merupakan uji coba menerapkan SOP (*Standart Operating Procedure*) yang masyarakat susun sendiri. Dengan adanya gladi, masyarakat mengetahui alur informasi darimana, pola kerjanya bagaimana, serta tim sekolah siaga bencana yang terdiri dari tim peringatan dini, tim kesehatan sekolah, tim evakuasi, tim sekolah darurat, dan tim keamanan mengetahui akan melakukan apa ketika terjadi bencana.

> "Indikatornya? Masyarakat terlatih. Subindikatornya? Masyarakat ada SOP, ada rencana dan lain sebagainya", (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

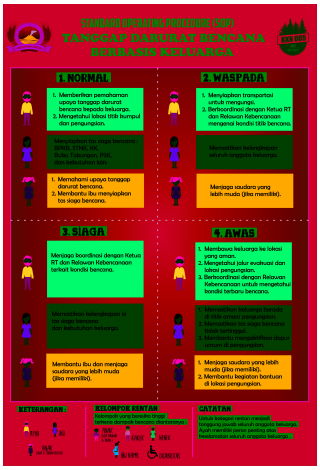
Adapun program BPBD Sleman yang lain adalah membentuk Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Tahun ini, direncanakan ada 8 sekolah dan 8 desa yang akan dibentuk di *buffer zone* atau desa-desa penyanggah seperti Desa Bimomartani, Desa Umbulmartani, Desa Lumbungrejo, Desa Merdikorejo, Desa Purwobinangon, Desa Umbulharjo, Desa Hargobinangun dan Desa Purwobinangun.



Gambar 3.2 Gladi lapang sekolah siaga bencana SMK Negeri 1 Depok Sleman (sumber: BPBD Sleman)

Namun, Totok merasa bahwa program dari pemerintah hanya sebatas program saja. Karena ia dan warga huntap Dongkelsari melakukan pelatihan membuat SOP tingkat keluarga sendiri.

> “Iya, tapi yo sama pemerintah iki yo sebatas program kalo pemerintah itu. Jadi yo kelemahannya pemerintah seperti itu”, (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).



Gambar 3.3 SOP tanggap darurat bencana berbasis keluarga (sumber: Totok Sondong Hartanto)

Terkait sekolah siaga bencana dan desa tangguh bencana, Totok menyayangkan program pemerintah yang tidak berkelanjutan. Seperti di beberapa sekolah sekitar huntap Dongkelsari yang memiliki plakat sekolah siaga bencana namun pendidikan wajib latih bencana tidak diperbaharui setiap tahunnya.

> “Harusnya kan juga di-*update* paling nggak setahun sekali karena tiap tahun anak SD ada yang lulus”, (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Termasuk pula di daerah Wukirsari yang memiliki plakat desa tangguh bencana, namun waktu programnya dinilai kurang efisien karena hanya dilakukan setiap hari Senin (seminggu sekali) dan kurang efektif karena tidak dilakukannya simulasi.

> “Pas pelatihan itu 5 kali pertemuan itu hanya berapa jam setiap hari Senin, uwong sudah lali gak disimulasikan juga”, (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Totok mengemukakan agar kiranya anggaran penanggulangan bencana di desa dapat digunakan untuk simulasi bencana dengan masyarakat. Menurutnya, Sleman belum sebagus Jawa Tengah yang telah memiliki MOU (*Memorandum of Understanding*) *sister village* atau desa bersaudara sebagai tempat mengungsi ke desa yang tidak terkena dampak bencana apabila terjadi bencana.

> "Khusus untuk Sleman itu saya kira gak sebagus Jawa Tengah, kalo Jawa Tengah bagus ada *sister village* juga kok, opo desa bersaudara", (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Sedangkan Cholik mengaku sedang menjalankan kegiatan yang berbasik setingkat lebih tinggi dari wajib latih yang biasanya. BPPTKG menginisiasikan tentang desa bersaudara yang saat ini menjadi program pemerintah dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Desa bersaudara sendiri merupakan daerah yang dekat dan rawan (desa rawan) terkena dampak bencana Gunung Merapi yang kemudian disaudarakan dengan daerah yang jauh (desa aman) dari Gunung Merapi sebagai tempat pelarian dan pengungsian. Pada tahun ini program tersebut dilaksanakan BPPTKG Yogyakarta di Klaten.

> "Minggu terakhir Maret kemarin itu kita mengadakan wajib latih untuk desa bersaudara. Kemarin di Klaten, kita 2 kali ini tahun ini ke Klaten semua", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Desa bersaudara sendiri memiliki beberapa parameter yaitu jumlah penduduk, jumlah ternak, dan fasilitas pengungsian. Desa bersaudara ini ditetapkan jarak amannya dengan radius lebih dari 15 km dari puncak Gunung Merapi.

> "Desa yang dikategorikan aman itu lebih dari 15 km", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Tak jauh berbeda dengan program-program pemerintah pada umumnya, Heri selaku kepala desa Kepuharjo mengaku melaksanakan pelatihan-pelatihan gerakan mengurangi resiko bencana, bahkan pernah melakukan kerjasama dengan Amerika pada tahun 2009 di Kepuharjo.

> "2009 itu kami pernah dilatih, pake *trick and detail* gitu loh, seolah-olah Merapi lagi erupsi", (wawancara Heri, Kamis 6 April 2017).

Berbeda dengan program-program pemerintahan, CRI justru memiliki program edukasi terkait radio komunitas dengan komunitas Jalin Merapi tentang bagaimana menyambungkan komunitas-komunitas di lingkar Merapi dengan teknologi informasi, manajemen di radio komunitas, pola penggunaan media yang tepat, pola penyebarluasan informasi yang benar khususnya di wilayah sekitar jaringan di Jalin Merapi.

> "Penguatan media komunitas melalui Jalin Merapi itu menjadi unggulan kita. Semacam pelatihan siaran, pelatihan menulis, pemilihan medianya yang benar", (wawancara Amrul, Senin 6 Maret 2017).

Program ini tidak hanya ditujukan kepada pengelola radio komunitas saja, namun juga lebih kepada warga masyarakat yang tinggal di sekitar radio komunitas. Untuk waktu pelaksanaan, Amrul mengaku bahwa CRI tidak dapat menjadwalkan waktu pelaksanaan program tersebut. Karena baik pengelola radio komunitas maupun masyarakat memiliki aktifitas masing-masing sehingga untuk masalah waktu bersifat kondisional.

> "Pengelola radio komunitas maupun masyarakat sekitar radio komunitas itu berada, utamanya disitu. Kita juga tidak bisa memaksakan soal waktu, jangan sampai apa yang kita lakukan mengganggu aktifitas pokok di warga masyarakat", (wawancara Amrul, Senin 6 Maret 2017).

Peneliti menemukan bahwa pada sub bab mitigasi pra bencana ini pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana sangat penting

dilakukan, baik di lingkungan sekolah maupun di kawasan rawan bencana. Karena hal ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi situasi tanggap darurat. Hanya saja peneliti melihat bahwa program yang dijalankan BPBD ini belum merata di seluruh kawasan rawan bencana dan belum ada pendidikan tingkat lanjut mengenai pendidikan pengurangan resiko bencana. Sehingga perlu diadakan evaluasi untuk pendidikan tingkat lanjut ini.

Selain itu, khususnya kawasan rawan bencana yang berada di daerah Cangkringan-Sleman, alangkah lebih baik BPPTKG memfokuskan untuk mulai mencari partner desa sebagai *sister village* apabila ke depannya terjadi bencana yang tidak terduga, sehingga masyarakat sudah tahu kemana harus berlari dan mengungsi.

3.4 Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi

3.4.1 Sumber Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Pola informasi yang dilakukan BPBD Sleman yaitu dimulai dari BPBD Sleman, lalu diteruskan ke Kecamatan, kemudian dari Kecamatan menyampaikan ke Pemerintah Desa dan UPT Pendidikan. Setelah sampai ke Pemerintah Desa, langsung disampaikan ke dukuh-dukuh yang berada di kawasan rawan bencana. Dan yang dari UPT Pendidikan, akan meneruskan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kawasan rawan bencana.

Namun tidak menutup kemungkinan informasi dari BPPTKG Yogyakarta langsung diteruskan oleh BPBD Sleman melalui frekuensi *handy talky* kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya distorsi informasi yang tidak benar. Selain pola komunikasi tersebut, pada status normal Gunung Merapi BPBD Sleman juga melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi, saat pembentukan sekolah siaga bencana dan desa tangguh bencana. Bahkan untuk menguji SOP yang masyarakat telah susun, BPBD Sleman mengadakan gladi.

> “Agar masyarakat terhindar dari informasi yang sifatnya *hoax* itu masyarakat panteng informasi yang resmi dan formal”, (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

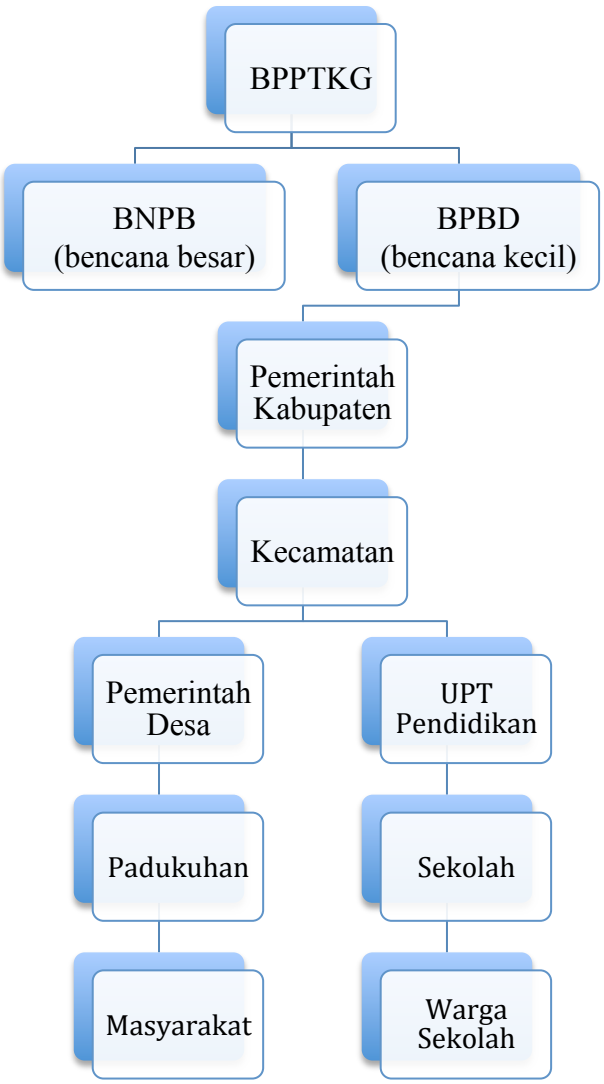
Pola komunikasi dari BPPTKG memiliki sedikit perbedaan. Menurut Cholik, dalam penanggulangan bencana terdapat 2 unsur, yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. Dimana BPPTKG sebagai unsur pengarah hanya bertugas memberi rekomendasi dan gambaran kepada pemerintah daerah melalui BPBD apabila bencananya kecil atau BNPB apabila bencananya lebih besar untuk diambil alih dan/atau meneruskan informasi yang diperoleh dari BPPTKG. Kemudian unsur pelaksana diandil oleh Pemerintah Daerah seperti BPBD yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, sampai ke Pemerintah Desa dan dusun.

> “Koornya ada di BNPB Pusat kemudian turun ke BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, sampe ke tim perangkat desa”, (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Sama dengan pola komunikasi BPBD dan BPPTKG, Totok dan Heri juga menyatakan bahwa pola komunikasi penanggulangan bencana tetap secara birokratif. Dimulai dari BPPTKG, BNPB dan/atau BPBD, kemudian ke Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, Padukuhan, lalu masyarakat.

Berbeda dengan pola komunikasi yang dikemukakan Amrul, ia berpendapat bahwa sumber informasi bisa dari mana saja. Tidak hanya dari pemerintah belaka, melainkan juga bisa dari media-media yang telah terbukti kebenarannya.

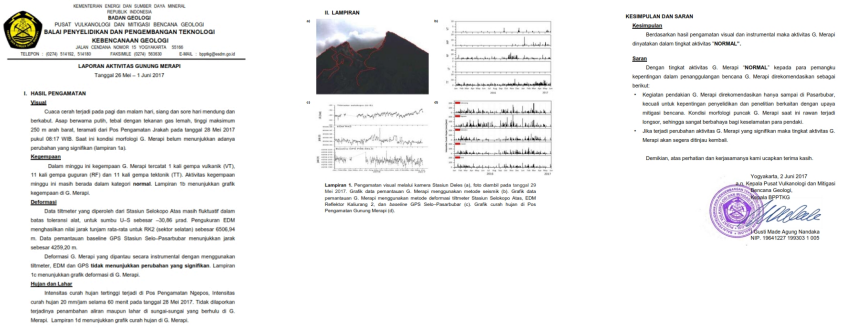
> “Dari pemerintah bisa, media dari berbagai macam pihak juga bisa, terkait dengan siapa penerima ingin mendapatkan informasi”, (wawancara Amrul, Senin 6 Maret 2017).



Bagan 3.1 Alur Komunikasi Utama

3.4.2 Isi Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Isi informasi yang disampaikan BPPTKG Yogyakarta, Cholik menjelaskan bahwa isi informasi kebencanaan berupa hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan setiap satu minggu sekali di Kantor BPPTKG Yogyakarta. Adapun 4 parameter yang terdapat dalam isi informasi yaitu visual, geokimia, seismi kegempaan, dan cuaca di Gunung Merapi. Terdapat pula kesimpulan analisa dan saran / rekomendasi.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI
JALAN CENDANA NOMOR 15 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 514152, 514180 FAKSIMILE (0274) 563838 E-MAIL : bpptkg@esdm.go.id

LAPORAN AKTIVITAS GUNUNG MERAPI
Tanggal 26 Mei – 1 Juni 2017

I. HASIL PENGAMATAN

Visual

Cuaca cerah terjadi pada pagi dan malam hari, siang dan sore hari mendung dan berkabut. Asap berwarna putih, tebal dengan tekanan gas lemah, tinggi maksimum 250 m arah barat, teramati dari Pos Pengamatan Jrakah pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 08.17 WIB. Saat ini kondisi morfologi G. Merapi belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan (lampiran 1a).

Kegempaan

Dalam minggu ini kegempaan G. Merapi tercatat 1 kali gempa vulkanik (VT), 11 kali gempa guguran (RF) dan 11 kali gempa tektonik (TT). Aktivitas kegempaan minggu ini masih berada dalam kategori **normal**. Lampiran 1b menunjukkan grafik kegempaan di G. Merapi.

Deformasi

Data tiltmeter yang diperoleh dari Stasiun Selokopo Atas masih fluktuatif dalam batas toleransi alat, untuk sumbu U–S sebesar –30,86 μrad. Pengukuran EDM menghasilkan nilai jarak lunjam rata-rata untuk RK2 (sektor selatan) sebesar 6506,94 m. Data pemantauan baseline GPS Stasiun Selo–Pasarbubar menunjukkan jarak sebesar 4259,20 m.

Deformasi G. Merapi yang dipantau secara instrumental dengan menggunakan tiltmeter, EDM dan GPS **tidak menunjukkan perubahan yang signifikan**. Lampiran 1c menunjukkan grafik deformasi di G. Merapi.

Hujan dan Lahar

Intensitas curah hujan tertinggi terjadi di Pos Pengamatan Ngepos. Intensitas curah hujan 20 mm/jam selama 60 menit pada tanggal 26 Mei 2017. Tidak dilaporkan terjadinya penambahan aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di G. Merapi. Lampiran 1d menunjukkan grafik curah hujan di G. Merapi.

II. LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengamatan visual melalui kamera Stasiun Deles (a), foto diambil pada tanggal 29 Mei 2017. Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode seismik (b). Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode deformasi tiltmeter Stasiun Selokopo Atas, EDM Reflektor Kaliurang 2, dan baseline GPS Selo–Pasarbubar (c). Grafik curah hujan di Pos Pengamatan Gunung Merapi (d).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental maka aktivitas G. Merapi dinyatakan dalam tingkat aktivitas "**NORMAL**".

Saran

Dengan tingkat aktivitas G. Merapi "**NORMAL**" kepada para penangku kepentingan dalam penanggulangan bencana G. Merapi direkomendasikan sebagai berikut:

- Kegiatan pendakian G. Merapi direkomendasikan hanya sampai di Pasarbubar, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Kondisi morfologi puncak G. Merapi saat ini rawan terjadi longsor, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan para pendaki.
- Jika terjadi perubahan aktivitas G. Merapi yang signifikan maka tingkat aktivitas G. Merapi akan segera dilinjau kembali.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 Juni 2017
a.n. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Kepala BPPTKG

Hanik Humaida
NIP. 19641227 199303 1 005

Gambar 3.4 Laporan aktivitas Gunung Merapi tanggal 26 Mei – 1 Juni 2017 (sumber: BPPTKG Yogyakarta)

Bahkan ketika status Gunung Merapi "normal", BPPTKG tetap mempublikasikan hasil analisis tersebut. Karena pada umumnya, masyarakat menanti adanya informasi resmi seputar Gunung Merapi, baik itu statusnya, maupun adanya kenaikan eskalasi atau tidak. Sehingga masyarakat tidak dengan mudah mempercayai adanya rumor tentang Gunung Merapi. Terlebih lagi Gunung Merapi sudah 7 tahun tidak ada letusan besar, maka banyak isu-isu *hoax* yang beredar seputar Gunung Merapi. Untuk itu, setiap minggunya BPPTKG mempublikasikan hasil analisa Gunung Merapi.

> "Kadang ada suara gemuruh dari Merapi menjadikannya isu. Laporan ini menjadi acuan bagi masyarakat", (wawancara Cholik, Sabtu 22 April 2017).

Hal tersebut juga disebutkan Totok bahwa isi informasikan yang disampaikan kepada masyarakat adalah seputar status Gunung Merapi, ada tidaknya aktifitas gempa, dimana informasi tersebut diinformasikan oleh BPPTKG Yogyakarta secara berkala dan rutin. Namun menurut Totok, informasi Gunung Merapi sebaiknya bukan hanya seputar aktifitas dan status Gunung Merapi saja, melainkan adanya informasi mengenai pendakian, aktifitas-aktifitas di Gunung

Merapi, ataupun informasi adanya pelatihan mitigasi bencana juga penting untuk diinformasikan kepada masyarakat.

> "Misalnya pelatihan mitigasi bencana, nah itu penting untuk diinformasikan karena Merapi banyak macamnya kalo informasi, bukan hanya aktifitas aja", (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Menurutnya, informasi seperti itu belum merata, karena Gunung Merapi masuk dalam 4 kabupaten yaitu Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten, sehingga pemerintah lebih aktif di wilayah administratif saja.

Berbeda dengan Totok, menurut Heri isi informasi kebencanaan juga dapat berupa pembawaan surat-surat berharga warga sebelum meninggalkan rumah huni mereka di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Surat-surat berharga yang maksudkan yaitu seperti sertifikat, ijazah, sim, bpkb, dan lain sebagainya. Selain itu, menginformasikan bahwa ibu-ibu hamil dan lansia untuk dievakuasi terlebih dahulu.

> "Ya yang disampaikan utamanya yang harus dibawa itu surat-surat penting. Yang kedua, yang diutamakan itu ibu hamil dan lansia itu yang didahulukan harus dievakuasi", (wawancara Heri, Kamis 06 April 2017).

3.4.3 Media Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Media yang digunakan dalam penyebaran informasi kebencanaan bermcam-macam. Heru menyatakan bahwa informasi akan disampaikan BPBD Sleman apabila terjadi kenaikan eskalasi pada Gunung Merapi, juga menentukan kapan dan dimana masyarakat mengungsi. Selain itu, BPBD Sleman juga memiliki *sms gateaway* yang otomatis akan disebar ke lurah-lurah, relawan, dan beberapa pejabat di Sleman untuk mempublikasikan status Gunung Merapi.

> "Isi informasinya ya bagaimana status Merapi, kalo misalnya ada eskalasi kenaikan status Merapi ada *sms gateaway* yang langsung ke lurah-lurah yang pejabat", (wawancara Heru, Rabu 8 Maret 2017).

Selain *sms gateaway,* media yang digunakan BPBD Sleman ada beberapa, yaitu melalui *website www.bpbd.sleman.go.id* untuk akses informasi Gunung Merapi secara *real time*, *www.bgl.go.id* untuk akses informasi Gunung Merapi secara *real time* juga dan ada informasi hasil analisis Gunung Merapi setiap minggunya. Selain itu melalui Pemerintah Kabupaten Sleman, BPBD Sleman juga sering mempublikasikan informasi kebencanaan melalui media elektronik televisi, seperti di Varia Sleman dan TVRI.

> "Website-nya ada ya, bahkan status Merapi *real time* bisa diakses disitu. Kita juga sering menggunakan media televisi untuk menyampaikan informasi tentang bencana", (wawancara Heru, Rabu 8 Maret 2017).

Sayangnya BPBD Sleman belum memiliki akun resmi di media sosial, aku Heru. Karena perlu adanya konsep, kesanggupan mengelola, keterbatasan waktu, dan tim khusus untuk mengelolanya. Adapun aplikasi Lapor Sleman yang dikelola Kominfo untuk memudahkan warga melapor kejadian disekitarnya dan akan diteruskan ke instansi yang bersangkutan. Misalnya seperti kejadian bencana, akan diteruskan ke BPBD atau masalah sampah, diteruskan langsung ke PHA. Namun, aplikasi ini belum diketahui keefektifitasannya kepada masyarakat.

> "Untuk sosial medianya belum, nanti waktu kita habis disitu ya mbak ya, minimal harus ada orang tim", (wawancara Heru, Rabu 8 Maret 2017).

Menurut Cholik, BPPTKG mencoba menggunakan semua media yang ada untuk mempublikasikan informasi kebencanaan ke

semua kalangan. Karena menurutnya, tingkat keefektivitasan penyebarluasan informasi dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan pengguna media. Seperti melalui surat resmi untuk pemerintah daerah biasanya dikirim melalui *fax* atau *email*, radio dan *handy talky* biasanya digunakan orang tua dan komunitas sebagai akses informasinya, media sosial (seperti *facebook, twitter, instagram, whatsapp*) untuk kebanyakan anak muda, dan *website* untuk masyarakat luas. Bahkan pada tahun 2010, masyarakat sekitar Gunung Merapi sudah banyak yang menggunakan sosial media seperti *facebook* dan *BBM* sehingga BPPTKG Yogyakarta sempat memiliki *BBM channel* untuk laporan seputar Gunung Merapi.

> "Semua media kita pake. Jadi moda apa moda infokomnya, moda informasi komunikasinya, itu kan emang kita coba masuk ke semua", (wawancara Cholik, Selasa 9 Mei 2017).

Setiap hari jum'at BPPTKG Yogyakarta meng-*upload* hasil analisa Gunung Merapi di *website*, bahkan disebar pula melalui personal maupun grup di *whatsapp* dengan sasaran agar pesan berantai. Tak jarang admin-admin akun media sosial yang menerima pesan berantai tersebut menyebarluaskan informasi melalui akun media sosialnya.

> "Aku sendiri menggunakan sosial media, info-info dari BPPTKG langsung tak *share* meneh di sosial media", (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Hal ini yang dirasakan oleh Totok sebagai salah seorang yang menerima pesan berantai BPPTKG Yogyakarta melalui *whatsapp*. Ia merasa bahwa media ini lebih cepat sampai ke masyarakat. Selain *whatsapp*, BPPTKG Yogyakarta menurut Totok mengenal banyak teknologi, selain yang sudah disebutkan di atas, BPPTKG Yogyakarta juga menggunakan media sosial website di *www.merapi.bgl.isdm.co.id*, *fanpage*, *twitter* yang lebih interaktif, dan

soundcloud yang berupa suara, sehingga memudahkan komunitas radio mengakses melalui *link* yang diberikan BPPTKG Yogyakarta untuk disiarkan di radio komunitas mereka.

> "Melalui WA (whatsapp), dikirim temen-temen BPPTKG, dia memotong apa yo biar lebih cepat. Sampai soundcloud itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa", (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Tak hanya media sosial, Totok juga mengaku bahwa sinyal seismik melalui *handy talky* dan toak masjid juga merupakan media yang efektif di dusun. Jadi media sosial, *sms* / pesan berantai, bahkan kentongan merupakan macam-macam media yang dapat digunakan untuk penyebaran informasi bencana.

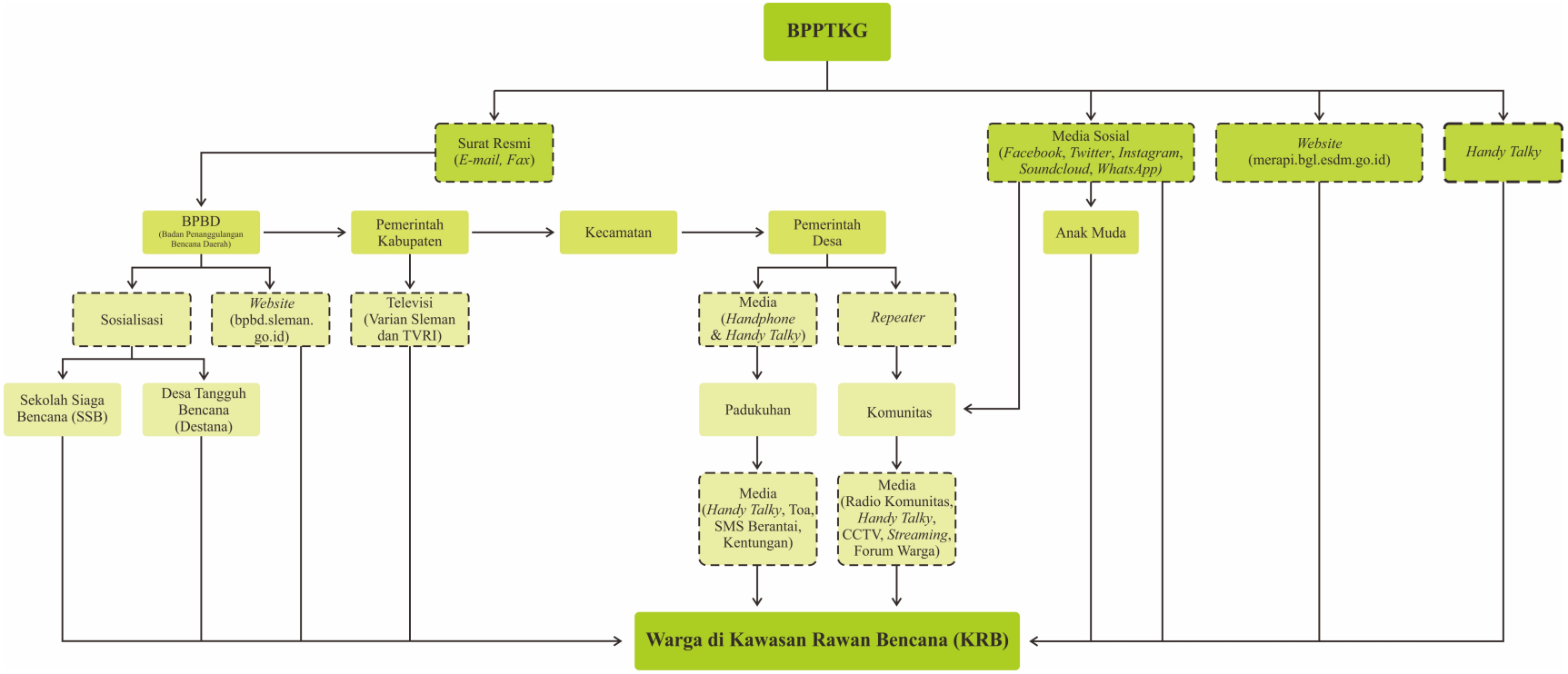
Heri mengatakan bahwa media yang banyak digunakan oleh dukuh-dukuh yaitu *handphone* dan *handy talky*. Selain itu, komunitas-komunitas di desa seperti radio komunitas SKSB Cangkringan dan komunitas Cakra juga sudah memiliki *repeater* untuk langsung dikomunikasikan ke tokoh-tokoh masyarakat.

> "Media yang digunakan ya yang jelas nek sama pak dukuh ada hp dan juga handy talky itu", (wawancara Heri, Kamis 6 April 2017).

Amrul mengaku banyak media yang digunakan untuk mempublikasikan informasi kebencanaan, salah satunya adalah radio komunitas. Media lain seperti *handy talky*, *cctv*, *streaming* radio komunitas, forum-forum warga juga masih sering digunakan hingga saat ini.

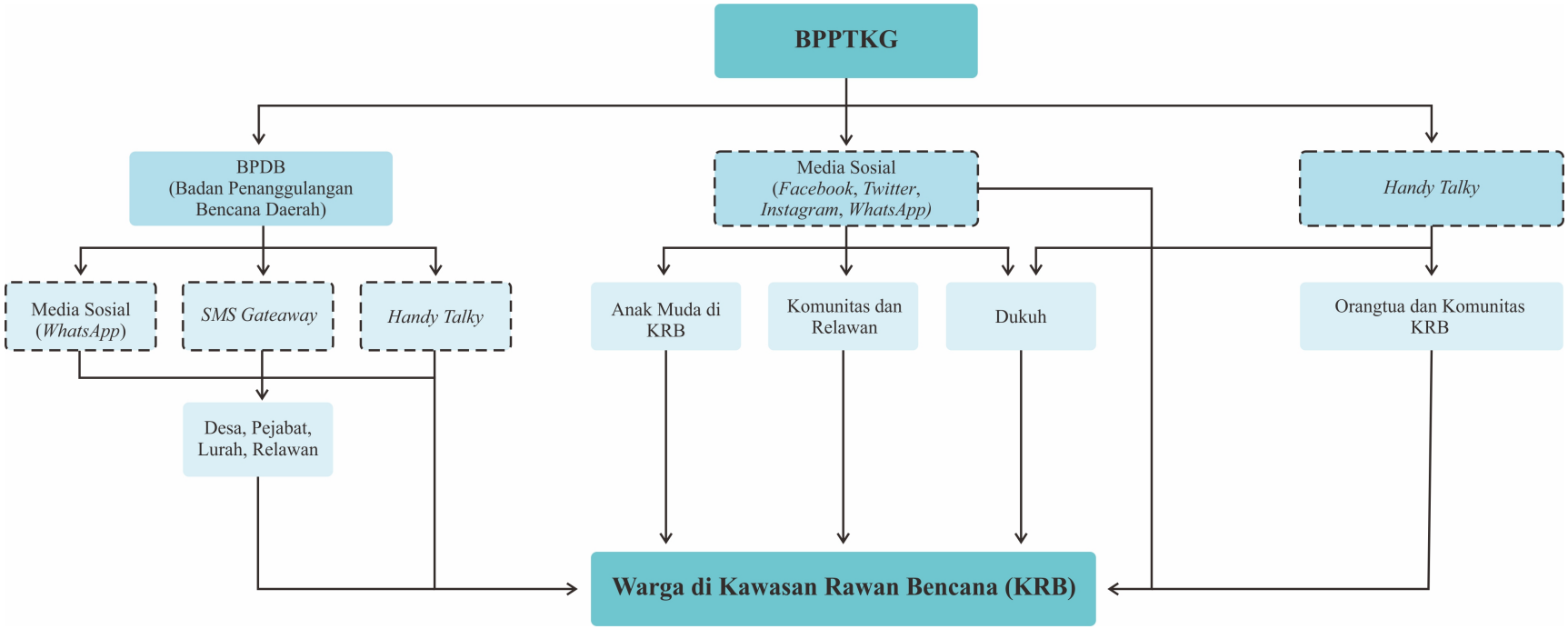
> "Semua media digunakan, karena belum semua warga memiliki radio, makanya ada namanya forum warga, pertemuan langsung", (wawancara Amrul, 6 Maret 2017).

Idealnya, semua media yang telah disebutkan tetap harus digunakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan informasi yang diperoleh khalayak akan berbeda. Sebaiknya informasi dari pemerintah disamakan walaupun media yang digunakan berbeda-beda, seperti memfasilitasi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana dengan memberikan radio penerima bagi yang suka mendengar radio, atau mengadakan pendanaan mencetak informasi bagi yang suka membaca. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar, baik itu untuk mitigasi bencana maupun untuk tanggap darurat.



Bagan 3.2 Alur Komunikasi Masa Normal Gunung Merapi

(sumber: data primer peneliti)



Bagan 3.3 Alur Komunikasi Masa Tanggap Darurat Gunung Merapi

(sumber: data primer peneliti)

3.5 Hambatan dan Kritik Atas Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana di Gunung Merapi

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terdapat adanya hambatan-hambatan pada pola komunikasi penanggulangan bencana di Gunung Merapi. Komunitas *Combine Resource Institution* menyatakan bahwa hambatan-hambatan justru lebih banyak dari pihak masyarakat. Masyarakat terlalu cepat menyebarkan informasi melalui sosial media yang membuat berbagai pihak semakin panik, terlebih lagi informasi yang disebarkan tersebut belum tentu informasi yang benar dan dari sumber yang valid. Untuk itu penting bagi masyarakat untuk teliti dalam mengkonsumsi berita, seperti waktu kejadian, lokasi kejadian, dan sumber informasinya.

> "Masyarakat itu terlalu latah dalam menginformasikan kejadian bencana. Keseringan kita update status dulu, kadang-kadang ini yang membuat panik. Cari rujukan informasi yang bener-bener orang yang yang mengeluarkan informasi tersebut", (wawancara Amrul, Senin 6 Maret 2017).

Hambatan juga terjadi antara komunitas *Combine Resource Institution* dengan *stakeholder*, seperti adanya ego sektoral. Setiap lembaga tentunya memiliki beberapa program unggulan masing-masing, akan tetapi karena ego sektoral inilah yang membuat sulitnya menggabungkan program yang dijalankan komunitas dengan pemerintah. Padahal hasil yang dikeluarkan dari masing-masing program tersebut sama, seperti penguatan kapasitas masyarakat terkait penanggulangan bencana, hanya saja nama masing-masing program saja yang membedakan.

> "Banyak program-program komunitas yang sebenarnya sama dengan program yang *stakeholder* punya. Namun karena mengagungkan masing-masing program jadi agak susah untuk disatukan, padahal output-nya sama", (wawancara Amrul, Senin 6 Maret 2017).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tampaknya ini hambatan yang berbeda, dimana banyak warga yang tidak mengungsikan diri dengan alasan hewan ternak yang mereka miliki. Sehingga untuk ke depannya, pemerintah sudah akan menyediakan dan menghimbau warga untuk ikut serta mengungsikan hewan ternak mereka di tempat ungsian hewan (lapangan) yang telah disediakan. Seperti di Desa Kepuharjo, tempat ungsian hewan ternak berada di Lapangan Jabal Kadi Wukirsari.

> "Karena nek nda diungsikan (hewan ternak), masyarakat kan biasane alasane mesti 'pak, makani sapi', maka sekarang hewan pun harus diungsikan", (wawancara Heri, Kamis 6 April 2017).

Menurut Amrul, pada tahun 2010 banyak informasi yang dilebih-lebihkan oleh awak-awak media lokal maupun internasional untuk menjadikan informasi yang diberitakan ini menjadi sorotan publik. Padahal informasi yang diberitakan tersebut melebihi apa yang sebenarnya terjadi.

Seperti salah satu media yang sedang melakukan siaran langsung pada saat erupsi Merapi 2010 di Jalan Kaliurang Km. 14,5 depan kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, salah satu awak media tersebut menyebarkan abu di atas reporter sehingga terlihat begitu parahnya erupsi Gunung Merapi.

> "Ada media mainstream sampai menyebarkan abu di atasnya seakan-akan kejadian itu sudah luar biasa", (wawancara Amrul, Senin 6 Maret 2017).

Amrul menjelaskan bahwa secara garis lurus memang jarak antara lokasi kejadian dengan Jalan Kaliurang Km. 14,5 tidak begitu jauh. Namun terdapat perbedaan jalur antara Jalan Kaliurang dengan Kali Bronggang yang cukup jauh. Hal ini yang menimbulkan efek yang negatif pada khalayak dan penerima informasi.

> “Banyak yang mengira dengan wilayah radius 14 kilometer dari puncak Merapi itu kondisinya sama, padahal tidak”, (wawancara Amrul, 6 Maret 2017).

Tentu dalam pola komunikasi penanggulangan bencana terdapat hambatan-hambatan yang bersifat individu pula, seperti yang dikemukakan Totok bahwa terdapat hambatan komunikasi ke masyarakat. Terkadang, masyarakat sulit untuk menyelaraskan waktu untuk ikut dalam sosialisasi maupun mitigasi bencana secara bersama dengan alasan urusan ekonomi. Jadi, perlu menganalisa waktu kapan masyarakat memiliki waktu luang yang bersamaan dan mengetahu kapan waktu masyarakat beraktifitas.

> “Kadang nek masyarakat urusan weteng, maksudnya urusan ekonomi. Susah cari waktunya, kan tidak sama”, (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Heru juga merasakan hambatan yang serupa dengan yang disampaikan Totok. Masyarakat yang pada umumnya menggantungkan kepentingan ekonominya di wilayah lereng Gunung Merapi seperti di sisi Barat Gunung Merapi adanya penanaman dan penjualan salak pondoh, di sisi Timur adanya penjualan material bekas erupsi Gunung Merapi dan wisata *lava tour*. Sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat masih memikirkan kepentingan ekonominya yang membuat masyarakat enggan untuk dievakuasi.

> “Kepentingan ekonomi inilah yang membikin masyarakat agak sedikit susah untuk dilakukan evakuasi. Ke depannya kita harus punya konsep yang jelas tentang pengembangan ekonomi di lereng Merapi itu”, (wawancara Heru, Rabu 08 Maret 2017).

Selain itu hambatan komunikasi dengan pemerintah yang sepertinya belum menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, memanfaatkan anggaran penanggulangan bencana, dan membenahi sarana dan prasarana yang sudah rusak.

> “Pemerintah desa kayaknya juga belum menyadari pentingnya opo sinau seperti itu, nyatanya kurang adanya kegiatan-kegiatan”, (wawancara Totok, Sabtu 22 April 2017).

Berdasarkan pengalaman, Heri sebagai kepala desa merasa tidak ada hambatan-hambatan yang begitu serius mengenai pola komunikasi penanggulangan bencana, baik itu hambatan dengan masyarakat maupun dengan pemerintah itu sendiri. Hambatan yang ia rasakan berupa tidak adanya jaringan atau sinyal *handphone* untuk menginformasikan kebencanaan karena padamnya listrik, akan tetapi dengan adanya *handy talky* bisa menjadi pengganti *handphone* yang tidak memerlukan jaringan.

> “Nek biasannya nek bencana itu kan kaitannya dengan listrik mati, itu pake hp itu trouble, sinyal trouble. Tapi nek pake ht tidak”, (wawancara Heri, Kamis 6 April 2017).

Berbeda dengan Cholik, Cholik merasa bahwa hambatan komunikasi yang sering terjadi justru dari pemberitaan atau informasi kebencanaan dari berbagai media. Tak jarang media-media mempublikasikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya demi untuk mendapatkan rating khalayak. Hal ini dapat membuat masyarakat yang mengonsumsi berita tersebut jadi panik atau bahkan ikut menyebarkan informasi tersebut yang belum tentu benar. Akan tetapi, Cholik merasa sangat terbantu dengan adanya sosial media untuk konfirmasi kebenaran berita-berita yang beredar tersebut, khususnya informasi kebencanaan.

> “Tantangannya disitu dari media mainstream yang kadang memberitakannya tidak sesuai. Tapi adanya sosial media lebih memudahkan kita untuk mengkonfirmasi berita salah tadi”, (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Seperti pada awal tahun 2015 *www.merdeka.com* yang merupakan salah satu media yang sudah dikenal oleh masyarakat memberitakan melalui akun sosial media *twitter* tentang adanya lava pijar di sisi Selatan Gunung Merapi. Kemudian banyak masyarakat pengguna *twitter* yang menyebarkan berita itu tanpa mengetahui sumber yang jelas. Melihat hal tersebut BPPTKG Yogyakarta langsung melakukan konfirmasi melalui akun media sosial bahwa berita yang disampaikan oleh *www.merdeka.com* itu tidak benar, sekaligus menginformasikan status dan aktifitas Gunung Merapi yang saat itu normal berdasarkan hasil pemantauan dari pos pengamatan.

> "Melihat berita itu heboh kan, jadi kita coba konfirmasi dan sampaikan aktifitas Merapi seperti ini", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

Dengan kejadian tersebut, pada tahun 2016 BPPTKG Yogyakarta mengadakan diskusi mengenai pemberitaan hoax dalam kebencanaan bersama para jurnalis, praktisi, *blogger* dan admin-admin media sosial. Tujuannya agar penyebar berita ini bisa diajak bekerjasama dan tidak asal memberitakan kebencanaan tanpa mengetahui sumber yang jelas.

> "Kita berharap mereka sebagai *booster* kita, *booster* untuk meneruskan informasi", (wawancara Cholik, Selasa 09 Mei 2017).

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada pembahasan kali ini, peneliti akan membahas berbagai temuan penelitian yang unik dan beragam. Mulai dari pengalaman saat erupsi Gunung Merapi 2010 dari pra erupsi hingga pasca erupsi, otoritas pemerintah dalam penanggulangan bencana, mitigasi saat pra bencana, pola komunikasi saat bencana terjadi, hingga hambatan-hambatan serta kritik-kritik mengenai pola komunikasi yang telah dilakukan.

Sesuai dengan rumusan masalah, dalam pembahasan penelitian ini, peneliti hanya akan membahas alur komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dalam upaya penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi serta model pola komunikasi yang digunakan BPBD Sleman. Tujuannya adalah untuk menjelaskan alur komunikasi BPBD Sleman dalam upaya penyebaran informasi kebencanaan dan penanggulangan bencana di Gunung Merapi, dan menjelaskan model pola komunikasi apa yang digunakan BPBD Sleman. Di sini, peneliti mengkategorikan pembahasan menjadi empat sub-bab, yaitu : a) Penanggungjawab informasi kebencanaan Gunung Merapi, b) Mitigasi pra bencana Gunung Merapi, c) Pola komunikasi Penanggulangan Bencana Gunung Merapi.

4.1 Penanggungjawab Informasi Kebencanaan Gunung Merapi

Mushkatel dan Weschler (1985) dalam (Nakamura, Umeki, dan Kato, Journal Science Direct, Part B, Agustus 2016 : 235-243) menyatakan bahwa tata kelola manajemen darurat harus dibagi di berbagai tingkat pemerintahan dan di antara berbagai sektor, sehingga mengurangi beban pada satu agensi tunggal. Dalam hal ini, penelitian menemukan bahwa tata kelola manajemen komunikasi bencana pada tingkat pemerintahan sudah ada. Dalam wilayah Sleman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman merupakan penanggungjawab dalam informasi dan penyelenggaraan penanggulangan

bencana, namun BPBD Sleman juga memberi ruang kepada Bupati Sleman untuk bisa menyampaikan pesan.

BPBD Sleman sendiri telah memiliki struktur tersendiri dalam mempublikasikan informasi kebencanaan di Gunung Merapi, yaitu struktur Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops). Pusdalops tersebut bertugas memberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi bencana atau himbauan kepada masyarakat untuk *awareness* terhadap ancaman bencana.

Informasi bencana di Gunung Merapi, BPBD Sleman dapatkan dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta. Di mana BPPTKG Yogyakarta merupakan fasilitator, pengarah dan pemberi rekomendasi mengenai aktifitas Gunung Merapi kepada pemerintah, seperti BPBD Sleman. Sedangkan BPBD Sleman berperan sebagai pelaksana penanggulangan bencana dan penyebaran informasi kebencanaan agar sampai kepada masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa BPPTKG Yogyakarta juga ikut terjun langsung dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

Relasi antara BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta sudah cukup produktif. Dapat dilihat dari bagaimana keduanya saling koordinasi mengenai Gunung Merapi, baik itu berupa status maupun program-program mitigasi prabencana yang masing-masing instansi lakukan di KRB. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta saling ketergantungan dimana mekanisme yang dilakukan adalah penyebarluasan informasi status maupun ancaman Gunung Merapi.

4.2 Mitigasi Pra Bencana Gunung Merapi

Berkaitan dengan bencana, Swandewi dalam *paper*-nya menyatakan bahwa komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Dalam hal ini, komunikasi dikhususkan pada kegiatan pra bencana yang meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Seperti memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapan diadakan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana, kesiagaan yang diperlukan dan persiapan apa saja yang

harus dilakukan ketika terjadi bencana (Swandewi, https://www.scribd.com/doc/283167346/Manajemen-Sistem-Informasi-Dan-Komunikasi-Dalam-Bencana#, diakses pada tanggal 22 September 2017 pukul 19.09). Penelitian ini menemukan program mitigasi pra bencana telah dijalankan seperti pelatihan dan pendidikan tentang penanggulangan bencana, baik oleh BPBD Sleman maupun BPPTKG Yogyakarta.

Program yang dijalankan BPBD Sleman diantaranya adalah Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kedua program tersebut secara umum prosesnya sama, yaitu berbentuk klasikal dengan enam kali pertemuan. Seperti program SSB yang dimulai dari membentuk tim SSB, menyusun rencana kontijensi dan rencana penanggulangan bencana, kemudian diformasasikan ke dalam bentuk gladi. Dengan adanya gladi, masyarakat diuji cobakan menerapkan SOP (*Standart Operating Procedure*) yang masyarakat susun sendiri.

Nurdin (Nurdin, Jurnal Simbolika, No.1, April 2015 : 51-61) mengatakan bahwa selain informasi mengenai adanya potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan pada saat pra bencana. Berkaitan hal ini, peneliti menemukan bahwa program yang dijalankan BPBD Sleman ini belum merata di seluruh kawasan rawan bencana dan belum ada pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut, khususnya bagi sekolah-sekolah dan desa-desa yang diberi plakat sekolah siaga bencana dan desa tangguh bencana yang ada di sekitar hunian tetap Dongkelsari, pendidikan wajib latih bencana tidak diperbaharui setiap tahunnya. Di hunian tetap Dongkelsari sendiri, pendidikan dan pelatihan mitigasi pra bencana yang dilakukan BPBD Sleman dinilai kurang efisien karena hanya dilakukan seminggu sekali selama 6 pekan dan tanpa diadakannya simulasi dengan masyarakat.

Berbeda dengan program yang dijalankan BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta memiliki program yang setingkat lebih tinggi dari program wajib latih biasanya. BPPTKG Yogyakarta menginisiasikan tentang desa bersaudara yang saat ini menjadi program pemerintah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Desa bersaudara (*sister village*)

merupakan daerah yang dekat dan rawan (desa rawan) terkena dampak bencana Gunung Merapi yang kemudian disaudarakan dengan daerah yang jauh (desa aman) dari Gunung Merapi sebagai tempat pelarian dan pengungsian.

Program *sister village* ini membutuhkan desa-desa yang aman dari bencana sebagai desa-desa penerima. Dimana desa-desa yang dijadikan sebagai desa-desa penerima merupakan desa aman yang tidak termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi. Sedangkan desa-desa yang rawan sendiri merupakan desa-desa yang terkena dampak erupsi atau desa yang termasuk dalam KRB Gunung Merapi.

Rencana penerapan program *sister village* pada suatu wilayah dilakukan kajian secara fisik dan sosial. Secara fisik diperlukan penentuan desa-desa penerima untuk desa-desa rawan, sedangkan secara sosial dilakukan kajian terhadap respon masyarakat untuk rencana penerapan program *sister village* (Astriani, 2017 : 3). Penentuan desa-desa penerima mengacu pada rancangan program *sister village* yang telah dibuat oleh BPPTKG Yogyakarta, yang ditentukan berdasarkan beberapa parameter seperti, jumlah penduduk, jumlah ternak, dan fasilitas pengungsian. Ketersediaan fasilitas pengungsian di desa penerima seperti rumah warga, balai desa, dan gedung serbaguna akan menentukan jumlah kapasitas pengungsian. Namun, sayangnya pada tahun 2017 ini program tersebut hanya diadakan di Klaten dan Magelang, belum dilaksanakan di daerah Cangkringan-Sleman.

Terkait dengan pengungsi yang tidak mau mengungsi dengan alasan tidak mau meninggalkan hewan ternaknya, hal ini ditangani BPBD Sleman dan Pemerintah Desa Kepuharjo dengan merencanakan adanya tempat pengungsian untuk hewan ternak yang telah disediakan. Seperti di Pemerintah Desa Kepuharjo yang sudah akan menyediakan tempat pengungsian hewan ternak di Lapangan Jabal Kadi Wukirsari.

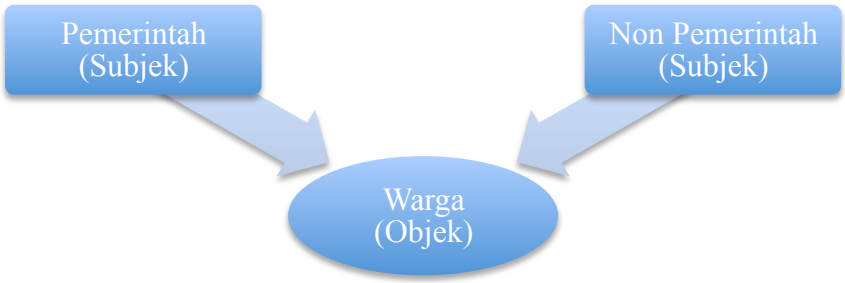
Sedangkan program mitigasi pra bencana yang dilakukan komunitas *Combine Resource Institution* (CRI) tentu berbeda dengan program-program pemerintahan. CRI memiliki program edukasi terkait radio komunitas dengan

komunitas Jalin Merapi tentang bagaimana menyambungkan komunitas-komunitas di lingkar Merapi dengan teknologi informasi, manajemen di radio komunitas, pola penggunaan media yang tepat, pola penyebarluasan informasi yang benar, khususnya di wilayah sekitar jaringan komunitas Jalin Merapi. Program ini tidak hanya ditujukan kepada pengelola radio komunitas semata, namun juga lebih ke warga masyarakat yang tinggal di sekitar radio komunitas.

Becker (2011) dalam (Davis dan Kapur, International Journal of Emergency Medicine, Maret 2014 : 1-7), komunikasi bencana telah dikritik karena kesiapsiagaan komunikasi masih terbelakang. Peneliti membenarkan hal ini karena program-program mitigasi pra bencana yang dijalankan pemerintahan masih tergolong program wajib latih yang itu-itu saja. Sedangkan masyarakat, khususnya warga hunian tetap Dongkelsari mengaku bahwa program tersebut sudah pernah dilaksanakan dan mengharapkan adanya program tingkat lanjut dari pemerintah seperti program *sister village* untuk memudahkan warga kemana harus berlari dan mengungsi apabila terjadi bencana.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa pada saat pra erupsi Gunung Merapi tahun 2010, pemerintah tidak bisa meningkatkan kapasitas masyarakat secara maksimal. Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana tahun 2010 masih tergolong rendah karena belum lahirnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cepat tanggap menghadapi bencana di Gunung Merapi. Akan tetapi, setelah erupsi Gunung Merapi 2010, peneliti menemukan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya meningkatkan kapasitas diri cepat tanggap dalam menghadapi erupsi di masa yang akan datang. Kesadaran masyarakat ini muncul dikarenakan pengalaman masyarakat yang terkena bencana dan dampak dari erupsi Gunung Merapi 2010, bukan berdasarkan program pemerintah yang kini dijalankan. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi pemerintah, baik BPBD Sleman maupun BPPTKG Yogyakarta untuk mengelola dan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana secara maksimal.

Peneliti menemukan bahwa pada konteks ini, baik dari sisi pemerintah (*government)* maupun non pemerintah (*non* government), masyarakat diposisikan sebagai objek bukan subjek dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat tidak mengetahui ancaman bencana di kawasan mereka dan tidak mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman bencana.



Bagan 4.1 Warga diposisikan sebagai objek

4.3 Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Gunung Merapi

Pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan tersebut diolah menjadi menjadi pesan lalu dikirim melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima pesan.

Terkait menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan model komunikasi Stephen P. Robbins dengan lima model, yaitu model rantai (*chain*), model roda (*wheel*), model lingkaran (*circle*), model bebas (*all channel*), dan model huruf "*Y*" (Rosady, 1998 : 94). Dengan ini, peneliti membagi pembahasan pola komunikasi menjadi dua bagian, sebagai berikut :

4.3.1 Pola Komunikasi Model Rantai (*Chain*) dan Model Jaringan Bebas (*All Channel*) Pada Masa Normal Gunung Merapi

Pada masa normal Gunung Merapi, mitigasi pra bencana merupakan salah satu tahap pencegahan resiko bencana dalam upaya penanggulangan bencana. Untuk itu penting bagi pemerintah mempublikasikan informasi seputar Gunung Merapi untuk menghindari masyarakat dari informasi yang tidak benar. Dalam tahap pencegahan resiko bencana ini, BPBD Sleman selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantara adalah BPPTKG Yogyakarta, BNPB Pusat, dan Bupati Sleman.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi pasal 4 huruf c mengatakan yaitu, "pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas dan rekomendasi teknis mitigasi bencana Gunung Merapi". Berdasarkan pasal tersebut, BPPTKG Yogyakarta diberikan wewenang untuk memberikan rekomendasi dan mempublikasikan informasi mengenai status Gunung Merapi.

Penelitian ini menemukan bahwa BPPTKG Yogyakarta melakukan analisis Gunung Merapi satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari Jum'at sore apabila status Gunung Merapi normal untuk diinformasikan ke instansi lain dan masyarakat. Lestari (dalam Budi (Ed.) 2011 : 99) menyatakan bahwa koordinasi penting untuk menghindari kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan bantuan dan kekeliruan penafsiran kondisi. Berhubung Gunung Merapi sudah 7 tahun tidak ada letusan besar, maka banyak isu-isu *hoax* yang beredar seputar Gunung Merapi di kalangan masyarakat. Untuk itu, pada masa normal sekalipun, BPPTKG Yogyakarta mempublikasikan informasi hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan setiap satu minggu sekali dari BPPTKG Yogyakarta yang paling utama diinformasikan.

Di sini, BPPTKG Yogyakarta merupakan sumber informasi yang resmi dan formal terkait Gunung Merapi. Informasi yang dikeluarkan

BPPTKG Yogyakarta, akan disampaikan ke BNPB dan/atau BPBD secara langsung.

Hasil dari koordinasi antara BPPTKG Yogyakarta dan BPBD Sleman tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan dan perencanaan kegiatan khususnya dalam pencegahan resiko bencana. BPPTKG Yogyakarta bertugas sebagai unsur pengarah dan memberikan rekomendasi kepada BPBD Sleman yang sebagai unsur pelaksana melalui koordinasi terstruktur.

Selain komunikasi secara langsung, baik BPBD Sleman maupun BPPTKG Yogyakarta juga menggunakan media lain seperti *e-mail, fax, sms,* dan media sosial untuk menyampaikan informasi kebencanaan Gunung Merapi agar sampai kepada masyarakat. Hasil temuan menemukan, media yang saat ini paling sering digunakan adalah media sosial *WhatsApp.* Melalui *WhatsApp,* BPPTKG Yogyakarta dapat memberikan informasi Gunung Merapi ke berbagai pihak, seperti ke pemerintah, komunitas relawan, bahkan ke tim perangkat desa.

Berdasarkan temuan data, untuk informasi kebencanaan Gunung Merapi yang bersifat umum dan luas, pada dasarnya alur komunikasi masa normal Gunung Merapi dapat dikatakan berjalan sesuai sruktur dan sistematis yang telah dibuat, dimana BPBD Sleman berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pencegahan bencana. Informasi pencegahan bencana pada masa normal Gunung Merapi bersumber dari BPPTKG Yogyakarta yang kemudian diteruskan ke BPBD Sleman melalui surat resmi (*e-mail, fax*) dan *WhatsApp*, BPBD Sleman ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten ke Kecamatan, Kecamatan ke Pemerintah Desa, Pemerintah Desa ke Padukuhan dan Komunitas melalui media (*handphone, handy talky, repeater*), hingga dari Padukuhan dan Komunitas tibalah informasi ke Warga di KRB melalui berbagai media (*handy talky,* toa, sms berantai, kentungan, radio komunitas, *cctv, streaming*, forum warga) (lihat Bagan 3.2).

Komunikasi semacam ini relevan dengan pola komunikasi model rantai. Model rantai (*chain*) adalah model yang dikenal sebagai sistem

komunikasi arus ke atas (*upward*) dan ke bawah (*downward*). Model ini menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando), baik ke atas maupun ke bawah tanpa terjadi suatu persimpangan (Rosady, 1998 : 94). Jika dikaitkan dengan hasil temuan data, BPBD Sleman berada diposisi tengah berperan sebagai pemimpin. Pemimpin yang dimaksud adalah BPBD Sleman berhak untuk menyampaikan atau tidak informasi pencegahan resiko bencana Gunung Merapi tersebut. Karena untuk urusan memberikan informasi kebencanaan Gunung Merapi, BPBD Sleman yang bertanggungjawab menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam lingkup wilayah Sleman.

Akan tetapi, hasil temuan data terdapat pula alur komunikasi masa normal Gunung Merapi yang berjalan secara non struktural. Alur komunikasi ini dilakukan oleh BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta yang mencoba menggunakan sosialisasi dan semua media yang ada untuk mempublikasikan informasi kebencanaan Gunung Merapi ke semua kalangan secara langsung, tanpa melalui struktur birokrasi yang ada (lihat Bagan 3.2).

Pada alur non struktural ini, komunikasi yang dilakukan BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta jika dilihat dari beberapa model pola komunikasi yang ada, pola komunikasinya lebih condong ke pola komunikasi model jaringan bebas (*all channel*), yaitu pola yang hampir sama dengan pola komunikasi model lingkaran (*circle*). Adapun kesamaan dengan pola komunikasi model lingkaran adalah semua tingkatan hirarki memiliki kekuatan yang sama dalam hal mempengaruhi anggota lainnya. Namun, dalam struktur pola komunikasi model jaringan bebas, semua jaringan komunikasi antar tingkatan jenjang hirarkinya tidak dibatasi dan semua staf bawahan bebas melakukan interaksi dengan berbagai pihak atau pimpinan, begitu juga sebaliknya (Rosady, 1998 : 94). Jika dikaitkan dengan temuan data, pola komunikasi BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta ini dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui perantara

sosialisasi dan berbagai media, tidak melalui dan tidak terbatas pada struktur birokrasi.

Pola komunikasi model jaringan bebas, memiliki ciri tersendiri yaitu komunikasi yang terjadi berjalan dua arah dan seluruh pihak yang ada ikut terlibat di dalamnya. Komunikasi dua arah yang dimaksud adalah komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif serta terdapat adanya *feedback* atau timbal balik (Widjaja, 2000 : 100).

Dalam temuan data, BPBD Sleman berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi dan *website* resmi BPBD Sleman yang secara *real time* meng-*update* informasi seputar Gunung Merapi. Sosialisasi yang dilakukan BPBD Sleman adalah melalui program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana). Setelah BPBD Sleman memberikan pendidikan dan pelatihan pencegahan resiko bencana melalui program tersebut, masyarakat yang hadir dapat memberi timbal balik dengan bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Sedangkan BPPTKG Yogyakarta selalu berusaha agar informasi kebencanaan Gunung Merapi dapat disebarluaskan kepada masarakat secara cepat dan tepat. Seperti halnya dalam rutinitas menyebarluaskan hasil analisa Gunung Merapi setiap pekan, BPPTKG Yogyakarta tidak hanya memberikan informasi tersebut kepada instansi-instansi terkait, melainkan juga langsung disebarkan melalui media resmi BPPTKG Yogyakarta sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat saat itu juga dengan timbal balik pesan tersebut dapat diteruskan oleh satu masyarakat ke masyarakat lain ataupun berupa memberi komentar dan pertanyaan kepada BPPTKG Yogyakarta terkait informasi yang disebarkan tersebut.

Dilihat dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa alur komunikasi pada masa normal Gunung Merapi tidak selamanya dilakukan secara struktural dan sistematis. Alur komunikasi yang dilakukan BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta pada masa normal Gunung Merapi menunjukkan ada dua alur, yaitu alur struktural dan alur non struktural. Berdasarkan alur komunikasi yang tersebut, pola

komunikasi yang digunakan BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta pada masa normal Gunung Merapi, serta merujuk pada model pola komunikasi Stephen P. Robbins, dari lima model pola komunikasi yang ada, BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta termasuk menggunakan dua model pola komunikasi, yaitu gabungan antara model rantai (*chain*) dan model bebas (*all channel*).

Hal ini sangat relevan dengan pola komunikasi model rantai dan model bebas berdasarkan teori Stephen P. Robbins dimana komunikasi penyampaian informasi pencegahan resiko bencana pada masa normal Gunung Merapi oleh BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta dapat dilakukan secara berantai dengan satu pelaku informasi dan secara bebas dengan tidak berpatokan dengan satu sumber informasi.

Sehingga dalam penelitian ini, pola komunikasi model rantai jika dikaitkan dengan BPBD Sleman, BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung secara *upward* kepada BPPTKG Yogyakarta yang menjadi sumber informasi kebencanaan Gunung Merapi. Tidak hanya komunikasi langsung secara *upward*, BPBD Sleman juga melakukan komunikasi langsung secara *downward* kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan komunitas-komunitas relawan dalam penyampaian informasi kebencanaan Gunung Merapi kepada masyarakat.

Dalam koordinasi ke atas dan ke bawah ini, dilakukan secara langsung maupun melalui perantara surat resmi dan media sosial (*WhatsApp* yang paling sering digunakan). Koordinasi selalu dilakukan BPBD Sleman dengan BPPTKG Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan komunitas-komunitas relawan secara baik. Melalui koordinasi tersebut, tiap pemerintah dan non pemerintah membentuk program mitigasi pra bencana saat masa normal.

Sedangkan model jaringan bebas, di sini warga masyarakat dapat menjangkau informasi kebencanaan Gunung Merapi langsung dari informasi yang disebarkan oleh BPPTKG Yogyakarta tanpa harus melalui struktur birokrasi yang ada. Model jaringan bebas ini

diterapkan BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta untuk dapat menyampaikan langsung informasi kebencanaan Gunung Merapi kepada warga masyarakat. Seperti melalui sosialisasi maupun melalui media sosial untuk sasaran anak muda di KRB, komunitas-komunitas relawan dan masyarakat umum, dan menggunakan *handy talky* untuk sasaran orang tua di KRB. Sedangkan melalui *website* untuk masyarakat umum.

Berdasarkan pembahasan di atas, pola komunikasi model jaringan bebas lebih dominan dalam alur komunikasi pada masa normal Gunung Merapi daripada pola komunikasi model rantai di kalangan masyarakat. Pola ini dinilai lebih cepat dan efisien sampai langsung ke masyarakat, terlebih zaman semakin menuntut adanya kecepatan penyebaran informasi bagi masyarakat.

Hal ini diperjelas oleh komunitas relawan CRI, yang berpendapat bahwa sumber informasi kebencanaan dapat diperoleh dari mana saja. Tidak hanya dari pemerintah belaka, melainkan juga dari media-media lain yang telah terbukti kebenaran dan kecepatannya.

Salah satu peran komunitas disini adalah menyebarluaskan sistem informasi peringatan dini status aktivitas Gunung Merapi. BPPTKG Yogyakarta maupun BPBD Sleman memiliki frekuensi *handy talky* untuk koordinasi penanggulangan bencana dengan masyarakat yang memiliki *handy talky*. Namun, karena jadwal frekuensi *handy talky* tidak menentu, maka masyarakat juga memantau dan mendapatkan informasi Gunung Merapi dari radio-radio komunitas sekitar.

Selain berupa laporan, BPPTKG Yogyakarta juga mempublikasikan status terkini Gunung Merapi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPPTKG Yogyakarta di media sosial.

Adapun isi pesan informasi kebencanaan lainnya yang disampaikan pada masa normal Gunung Merapi juga berupa pembawaan surat-surat berharga warga sebelum meninggalkan rumah huni mereka di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Surat-surat berharga yang dimaksudkan seperti sertifikat, ijazah, sim, bpkb, dan lain

sebagainya. Selain itu, menginformasikan bahwa saat bencana terjadi, ibu-ibu hamil dan lansia diterlebih dahulukan untuk dievakuasi.

Namun, peneliti menemukan bahwa pesan yang disampaikan hanya seputar aktifitas dan status Gunung Merapi. Informasi lainnya yang ada di sekitar Gunung Merapi, seperti mengenai pendakian, aktifitas-aktifitas di Gunung Merapi, maupun informasi adanya pelatihan mitigasi bencana yang akan atau sedang diadakan pemerintah masih belum merata. Pemerintah lebih aktif di wilayah administratif saja. Padahal informasi tersebut juga penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas.

4.3.2 Pola Komunikasi Model Rantai (*Chain*) dan Model Jaringan Bebas (*All Channel*) Pada Masa Tanggap Darurat Gunung Merapi

Pada masa tanggap darurat, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat tanggap darurat dengan menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pengurusan pengungsian, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Dalam masa ini, pola komunikasi penanggulangan bencana berjalan lebih cepat dan luas, karena koordinasi yang dilakukan melibatkan pemerintah, komunitas relawan, dan instansi-instansi lainnya. BPBD Sleman meminta rekomendasi dari BPPTKG Yogyakarta yang merupakan lembaga profesional untuk menentukan status eskalasi Gunung Merapi.

Berdasarkan pengalaman beberapa warga di hunian tetap Dongkelsari, mulai saat pra bencana tanggal 25 Oktober 2010 hingga pada saat erupsi Gunung Merapi tanggal 4 November 2010, tidak terdapat adanya koordinasi ataupun arahan dari pemerintah kepada masyarakat. Warga hunian tetap Dongkelsari mendapatkan informasi adanya kenaikan eskalasi status Gunung Merapi dari televisi dan dari komunitas Pasag Merapi dan mulai mengungsikan diri pada tanggal 4 November 2010. Namun sayangnya, masih banyak warga yang

kebingungan dalam mengahadapi situasi tanggap darurat. Misalnya meninggalkan barang-barang berharga ketika akan mengungsi, atau justru tidak ingin mengungsi dengan alasan tidak mau meninggalkan hewan ternaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya persiapan dari warga ketika erupsi Gunung Merapi datang, padahal erupsi termasuk bencana yang dapat diprediksi kedatangannya. Banyak warga yang mengalami kepanikan dan kebingungan pada saat letusan besar terjadi.

Warga hunian tetap Dongkelsari rata-rata mengungsikan diri di Koroulon, Cangkringan. Letusan Gunung Merapi paling besar pada tanggal 5 November 2010 dini hari dinggap warga terjadi secara tiba-tiba dan tidak terdapat adanya koordinasi di pengungsian Koroulon saat letusan terjadi. Akibat tidak adanya informasi yang jelas, para pengungsi di Koroulon berlarian mencari tempat aman tanpa mengetahui arah dan tujuan mereka kemana untuk tempat pengungsian selanjutnya.

Peneliti menemukan bahwa masyarakat pada masa tanggap darurat masih kurang siap dan kebingungan dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi 2010. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena penyaluran informasi yang kurang baik, kurang cepat dan tidak terorganisir baik itu informasi dari BPBD Sleman maupun dari BPPTKG Yogyakarta. Selain itu, masyarakat juga harus proaktif menanyakan pemerintah setempat seperti BPBD Sleman, BPPTKG Yogyakarta atau instansi terkait mengenai informasi seputar Gunung Merapi.

Adapun faktor lainnya adalah kurang perhatiannya masyarakat terhadap informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik itu dari BPBD Sleman maupun dari BPPTKG Yogyakarta. Seperti dari BPPTKG yang telah menyatakan bahwa aktivitas letusan Gunung Merapi bisa saja bahkan pernah sampai ke Kecamatan Cangkringan bahkan Kota/Kabupaten Sleman. Namun, masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut tetap merasa tenang dan aman, sehingga pada

saat erupsi Gunung Merapi terjadi, masyarakat mengungsi tanpa membawa surat-surat berharga yang telah dihimbau dari Pemerintah Desa dan hanya membawa pakaian yang dikenakan saja. Padahal daerah Cangkringan, khususnya Desa Wukirsari (kini huntap Dongkelsari) merupakan salah satu daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi 2010, dan melenyapkan permukiman yang diakibatkan oleh endapan aliran piroklastik dengan dominasi material batuan.

Berdasarkan temuan data, alur komunikasi pada masa tanggap darurat Gunung Merapi sama halnya dengan alur komunikasi pada masa normal Gunung Merapi, yaitu dapat dikatakan berjalan sesuai sruktur dan birokrasi yang telah dibuat. Dimana BPBD Sleman berkoordinasi dengan instansi-instansi yang turut andil dalam tanggap darurat penanggulangan bencana Gunung Merapi. Informasi status dan tingkatan Gunung Merapi saat tanggap darurat bersumber dari BPPTKG Yogyakarta yang kemudian diteruskan ke BPBD Sleman secara langsung atau melalui *WhatsApp*, BPBD Sleman teruskan ke Perangkat Desa, Pejabat, Lurah dan Komunitas Relawan melalui (*WhatsApp, SMS gateaway, handy talky*), hingga informasi sampai kepada masyarakat (lihat Bagan 3.3).

Komunikasi semacam ini relevan dengan konsep pola komunikasi model rantai (*chain*) yang menganut sistem komando agar tidak terjadinya penyimpangan informasi (Rosady, 1998 : 94). Jika dikaitkan dengan hasil temuan data, BPBD Sleman mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana setelah mendapatkan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun dari BPPTKG Yogyakarta, sehingga koordinasi yang dilakukan membutuhkan intensitas yang lebih dari koordinasi saat masa normal Gunung Merapi. BPBD Sleman meneruskan informasi tersebut secara berantai dan terorganisir kepada instansi-instansi terkait hingga sampai kepada masyarakat. Pola komunikasi yang melibatkan komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah ini relevan dengan model rantai. Dimana BPBD Sleman berada diposisi tengah yang berperan sebagai pemimpin.

Pemimpin disini adalah yang bertanggungjawab dalam pemberian informasi dan peringatan dini kepada masyarakat, serta bertanggungjawab pelaksanaan penanggulangan bencana saat masa tanggap darurat seperti melakukan pengungsian bagi warga yang tinggal di KRB.

Namun, hal ini bersenjangan dengan kenyataan saat erupsi Gunung Merapi 2010 lalu. Dimana tidak terdapat koordinasi yang baik antara pemerintah (di sini BPBD Sleman) dengan warga yang tinggal di Dusun Srodokan (kini Huntap Dongkelsari). Saat erupsi terjadi, tidak adanya koordinasi lokasi tempat pengungsian dan bunyi sirine pun terlambat dibunyikan. Sehingga warga panik dan menyelamatkan

Adapun hasil temuan data, menemukan adanya alur komunikasi non struktural pada saat tanggap darurat Gunung Merapi. Alur komunikasi ini dilakukan oleh BPPTKG Yogyakarta yang menggunakan semua medium yang ada untuk menyebarkan informasi. BPPTKG Yogyakarta menyebarkan informasi bencana Gunung Merapi melalui media sosial (*facebook, twitter, instagram, WhatsApp*) untuk sasaran anak muda, komunitas relawan, dan dukuh-dukuh. Dan menggunakan *handy talky* untuk orang tua dan komunitas di KRB (lihat Bagan 3.3).

Pada alur komunikasi non struktural ini, komunikasi yang dilakukan BPPTKG Yogyakarta relevan dengan pola komunikasi model jaringan bebas (*all channel*) dapat dilihat dari alur komunikasinya yang tidak membatasi adanya interaksi antara semua jaringan tingkat hirarki yang diungkapkan oleh Stephen P. Robbins dengan terdapat timbal balik dari pesan yang disampaikan (Rosady, 1998 : 94).

Dalam temuan data, BPPTKG Yogyakarta dapat melakukan koordinasi dan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, dengan respon masyarakat untuk memberitahukan ke masyarakat lain serta mempersiapkan diri mengungsi di tempat ungsian yang sudah ditetapkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa alur komunikasi pada masa normal tidak selamanya dilakukan secara struktural dan sistematis, tapi juga dapat berjalan secara non struktural. Untuk itu, peneliti menemukan bahwa pada masa tanggap darurat Gunung Merapi, terdapat dua model pola komunikasi, yaitu gabungan antara model rantai (*chain*) dan model jaringan bebas (*all channel*).

Pola rantai di sini seperti yang disampaikan Stephen P. Robbins (dalam Rosady, 1998 : 94) bahwa terdapat garis komunikasi langsung (komando) dalam memberikan dan mendapatkan informasi yang tentunya berpengaruh dalam penyampaian pesan informasi tanggap darurat di Gunung Merapi. Dalam alur komunikasi ini, BPBD Sleman berkoordinasi dan mendapatkan informasi terkait kenaikan tingkatan dan status Gunung Merapi dari BPPTKG Yogyakarta atau BNPB Pusat melalui *WhatsApp* atau secara komunikasi langsung ke atas (*upward*). Setelah mendapatkan informasi dari BPPTKG Yogyakarta, BPBD Sleman berkoordinasi secara komunikasi langsung ke bawah (*downward*) dengan instansi-instansi terkait seperti perangkat desa, pejabat, lurah, dan para relawan untuk menentukan langkah kegiatan penanggulangan bencana selanjutnya dan menyiapkan lokasi pengungsian yang sesuai dengan struktur yang telah dibuat untuk warga KRB, sebelum akhirnya informasi sampai ke masyarakat melalui *WhatsApp, sms gateaway,* maupun melalui *handy talky*.

Sedangkan menurut Robbins (dalam Rosady, 1998 : 94), model jaringan bebas merupakan model dimana semua tingkatan dalam jaringan ini dapat melakukan interaksi timbal balik tanpa melihat siapa tokoh sentralnya. Jika dikaitkan pada alur komunikasi masa tanggap darurat, dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan dan informasi tanggap darurat yang disampaikan BPPTKG Yogyakarta dapat secara langsung sampai ke masyarakat tanpa melalui struktur birokrasi yang ada. BPPTKG Yogyakarta dapat langsung menyampaikan informasi terkait penanggulangan bencana melalui media sosial (*facebook, twitter, instagram,* dan *WhatsApp*) untuk sasaran anak muda di KRB,

komunitas dan relawan, dan dukuh-dukuh. Kemudian menggunakan media *handy talky* untuk sasaran orang tua dan komunitas di KRB.

Di sini, BPPTKG Yogyakarta mencoba untuk menggunakan semua medium yang ada, untuk menyampaikan informasi secara langsung dan tidak membutuhkan waktu yang lama kepada masyarakat. Selain BPPTKG Yogyakarta berkoordinasi dan mengarahkan BPBD Sleman dan instansi-instansi terkait, BPPTKG Yogyakarta juga menginformasikan langsung kepada tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pengungsian.

Adapun alur komunikasi tanggap darurat untuk erupsi di masa yang akan datang, peneliti rangkum berdasarkan data yang peneliti peroleh yaitu sebagai berikut.



Bagan 4.2 Alur komunikasi tanggap darurat untuk masa yang akan datang

Pola komunikasi tanggap darurat untuk masa yang akan datang, dimulai dari informasi resmi dari BPPTKG Yogyakarta yang diteruskan ke BPBD Sleman, pejabat, perangkat desa, dan komunitas relawan.

Kemudian diteruskan sampai ke masyarakat, khususnya yang tinggal di KRB untuk mengungsi ke posko pengungsian terdekat dari masing-masing desa/dusun yang ada di KRB atau ke *sister village* (desa bersaudara) yang telah ditentukan.

Peneliti menemukan bahwa baik BPPTKG Yogyakarta maupun BPBD Sleman telah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan masyarakat dengan menyediakan posko pengungsian untuk masyarakat dan hewan ternaknya, serta menjalankan program *sister village* di beberapa KRB. Namun, peneliti melihat bahwa pemerintah belum maksimal dalam penyiapan lokasi pengungsian. Terkait *sister village* yang belum diterapkan secara menyeluruh di KRB, khususnya di daerah Sleman. Selain itu, tentu pemerintah perlu mengelola data penduduk di kedua desa terkait untuk mengetahui kapasitas desa, dan juga pemerintah perlu mengantisipasi untuk memfasilitasi transportasi masyarakat dari desa rawan ke desa aman.

Adanya prosedur tetap (protap) antara desa rawan dan desa aman tidak menjamin akan mengurangi kepanikan dan kesemrawutan manajemen pengungsian pada warga. Untuk itu, pemerintah harus serius dan cepat dalam mengelola program *sister village* di seluruh KRB, agar pada saat erupsi Gunung Merapi terjadi lagi, semua sudah dipersiapkan dengan matang dan meminimalisir banyaknya dampak dari erupsi.

Adapun desa aman yang ditetapkan BPBD Sleman adalah desa dengan jarak radius lebih dari 15 km. Seharusnya terdapat tiga skenario dalam kontijensi penanggulangan bencana. Apabila erupsi Gunung Merapi berdampak hanya di KRB III, erupsi Gunung Merapi mencapai radius 15 km, dan erupsi Gunung Merapi mencapai radius 20 km atau lebih. Pemerintah masih hanya mempertimbangkan erupsi kecil hingga sedang dengan daerah terdampak KRB III. Pemerintah belum memiliki rencana mitigasi jika terjadi erupsi besar yang mencapai 15 km atau hingga 20 km.

Peneliti juga melihat, bahwa dalam program *sister village* inipun, pemerintah masih saja menjadikan warga masyarakat sebagai objek, sumber daya masyarakat tidak digunakan secara optimal. Selain itu, jarak aman yang pemerintah tetapkan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak belajar dari pengalaman erupsi Gunung Merapi 2010 yang termasuk letusan dengan skala besar, dimana permukiman dengan jarak radius 15 km terkena dampak bencana. Sedangkan pemerintah menetapkan *sister village* desa aman pada radius di atas 15 km. Mengingat siklus-siklus erupsi Gunung Merapi yakni siklus pendek dua sampai lima tahun, siklus menengah lima sampai tujuh tahun, dan siklus panjang hingga 100 tahun (Surono, Journal of Volcanology and Geothermal Research, Vol. 241-242, Oktober 2012 : 121-135).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola komunikasi penanggulangan bencana dari pemerintah kepada masyarakat Yogyakarta dalam studi bencana di Gunung Merapi memiliki dua pola komunikasi, yaitu pola komunikasi pada masa normal dan pola komunikasi pada masa tanggap darurat. Pada masa normal, alur komunikasi terdapat dua alur yaitu alur secara struktural dan non struktural. Alur secara struktural, yaitu informasi yang disampaikan dari BPPTKG Yogyakarta secara birokrasi atau turun-temurun hingga sampai ke lapisan masyarakat. Sedangkan alur secara non struktural, informasi yang disampaikan dari BPPTKG Yogyakarta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa melalui jalur birokrasi yang ada.

Pada masa tanggap darurat, alur komunikasi juga terdapat dua alur yaitu alur secara struktural dan alur non struktural. Alur secara struktural, yaitu komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah melalui surat resmi untuk instansi lain secara birokrasi. Sedangkan alur secara non struktural, informasi yang disampaikan melalui jalur pribadi dan media sosial untuk komunitas relawan dan terakhir untuk masyarakat luas.

Perbedaan alur komunikasi struktural dan non struktural pada masa normal dan masa tanggap darurat adalah pada masa normal informasi cenderung lebih personal dengan mengharapkan penyebaran informasi Gunung Merapi melalui pesan berantai, sedangkan pada masa tanggap darurat informasi cenderung secara birokrasi melalui surat resmi untuk menjamin kebenaran informasi Gunung Merapi pada saat tanggap darurat. Adapun berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dalam penanggulangan bencana di Gunung Merapi pada masa

normal adalah gabungan antara pola komunikasi model rantai (*chain*) dan model jaringan bebas (*all channel*). Dalam penyampaian informasi, BPBD Sleman mendapatkan informasi kebencanaan yang bersumber dari BPPTKG Yogyakarta. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi model rantai, BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung ke atas (*upward*) ke BPPTKG Yogyakarta dan melakukan komunikasi langsung ke bawah (*downward*) ke Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Padukuhan, dan komunitas-komunitas relawan sebelum akhirnya informasi sampai ke masyarakat. Untuk pola komunikasi model jaringan bebas, BPPTKG Yogyakarta melakukan komunikasi timbal balik non truktural kepada masyarakat melalui berbagai media tanpa melalui jalur struktur birokrasi yang ada.

2. Pola komunikasi BPBD Sleman dalam penanggulangan bencana di Gunung Merapi pada masa tanggap darurat adalah gabungan pola komunikasi model rantai dan model jaringan bebas. Jika dikaitkan dengan pola komunikasi model rantai, BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung ke atas dengan BPPTKG Yogyakarta sebagai sumber informasi kebencanaan Gunung Merapi untuk mendapatkan informasi. Kemudian BPBD Sleman melakukan komunikasi langsung ke bawah dengan pejabat, lurah, perangkat desa, dan relawan hingga informasi sampai ke masyarakat. Untuk pola komunikasi model jaringan bebas, BPPTKG Yogyakarta melakukan komunikasi timbal balik dan menyebarkan langsung informasi tanggap darurat ke masyarakat secara non struktural melalui media sosial dan *handy talky*.
3. Sumber informasi kebencanaan di Gunung Merapi dalam wilayah Sleman adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman. Informasi kebencanaan di Gunung Merapi, BPBD Sleman dapatkan dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta berdasarkan hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan BPPTKG Yogyakarta.
4. Isi pesan yang disampaikan baik itu dari BPBD Sleman maupun dari BPPTKG Yogyakarta antara pola komunikasi pada masa normal dan

pada masa tanggap darurat juga berbeda. Dimana pada masa normal, isi pesan yang disampaikan adalah yang paling utama berupa hasil analisis Gunung Merapi yang dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) oleh BPPTKG Yogyakarta, selanjutnya mengenai status dan tingkatan aktivitas Gunung Merapi, kegiatan-kegiatan BPPTKG Yogyakarta di Gunung Merapi. Sedangkan pada masa tanggap darurat, isi pesan yang disampaikan adalah pemberitahuan tempat pengungsian, dan pembawaan surat-surat berharga warga saat akan meninggalkan rumah huni mereka yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi sesaat sebelum mengungsi.

5. Media yang digunakan untuk mempublikasikan informasi kebencanaan Gunung Merapi terdapat sedikit perbedaan yang digunakan pada masa normal dan masa tanggap darurat. Pada masa normal, pemerintah menggunakan media *e-mail, fax, website* (http://bpbd.slemankab.go.id/ dan http://merapi.bgl.esdm.go.id/), televisi (Varian Sleman dan TVRI), *handphone, handy talky, repeater, cctv, streaming,* toa, sms, radio komunitas, forum warga, dan media sosial (*whatsapp, facebook, twitter, instagram,* dan *soundcloud*). Sedangkan pada saat tanggap darurat, pemerintah menggunakan media *handy talky*, sms berantai, dan media sosial (*whatsapp, facebook, twitter, instagram*). Medium utama yang digunakan pada saat masa normal dan masa tanggap darurat adalah melalui *whatsapp* yang kecepatannya memadai agar pesan dapat diterima langsung oleh instansi terkait dan dapat diteruskan ke masyarakat secara berantai.
6. Pengirim dan penerima pesan kebencanaan Gunung Merapi (pola komunikasi pada masa normal) dimulai dari BPPTKG, pesan diteruskan ke BPBD, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Padukuhan dan Komunitas, baru sampai ke warga di KRB Gunung Merapi. Sedangkan pengirim dan penerima pesan kebencanaan Gunung Merapi (pola komunikasi pada masa tanggap darurat) dimulai dari BPPTKG, kemudian diteruskan ke BPBD, Desa, Pejabat, Lurah, Dukuh, Relawan, baru sampai ke masyarakat. Baik pada masa normal maupun

pada masa tanggap darurat, pemerintah dan non pemerintah memposisikan warga masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek.

7. Program BPBD Sleman yang dijalankan yaitu Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan Desa Tangguh Bencana (Destana) tidak diperbaharui setiap tahunnya. Warga hunian tetap Dongkelsari mengaku program tersebut hanya sebatas program dan plakat, tidak ada program pelatihan tingkat lanjut yang dilakukan., dan belum merata di seluruh kawasan rawan bencana.
8. Program BPPTKG Yogyakarta yang dijalankan yaitu *sister village* (desa bersaudara). Program ini belum diterapkan secara menyeluruh di wilayah Sleman, sehingga masih banyak permukiman di KRB yang belum tersentuh program ini. Pemerintah juga belum maksimal dalam persiapan desa bersaudara ini, seperti cenderung tidak belajar dari pengalaman erupsi Gunung Merapi 2010 dengan skala besar yang menetapkan desa aman dengan jarak radius 15 km, padahal pada tahun 2010 radius 15 km terkena dampak erupsi Gunung Merapi.
9. Program-program dari pemerintah maupun non pemerintah memposisikan masyarakat sebagai objek bukan subjek dalam penanggulangan bencana.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti membatasi pengambilan data hanya sampai pada instansi BPBD Sleman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan BPPTKG Yogyakarta di seksi Gunung Merapi, dan berfokus pada satu huntap yaitu Huntap Dongkelsari, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Adapun komunitas relawan yang peneliti wawancarai adalah CRI. Selain keterbatasan pengambilan data di atas, peneliti juga kesulitan mencari referensi atau kajian terkait pola komunikasi penanggulangan bencana yang penelitiannya masih minim di Indonesia.

Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat penelitian mengenai pola komunikasi, peneliti harap dapat melanjutkan penelitian ini ke jenjang dan instansi yang lebih tinggi serta, agar pengetahuan tentang pola komunikasi penannggulangan bencana tidak hanya sampai pada daerah Sleman saja.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk beberapa pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi-instansi penanggulangan bencana seperti BPBD Sleman dan BPPTKG Yogyakarta, yakni :
    a. Agar kiranya lebih gencar memberikan dan menyebarkan informasi kebencanaan Gunung Merapi, baik kepada masyarakat yang ada di KRB Gunung Merapi maupun masyarakat yang bukan di KRB agar tidak adanya kesimpang-siuran informasi atau berita *hoax* yang menyebar di kalangan masyarakat.
    b. Isi pesan yang disampaikan kepada masyarakat sebaiknya diperluas, tidak hanya seputar aktivitas dan status Gunung Merapi, melainkan juga adanya informasi mengenai pendakian, aktivitas-aktivitas di Gunung Merapi, maupun informasi adanya pelatihan mitigasi bencana yang sedang dilakukan.
    c. Tidak menjadikan masyarakat sebagai objek melainkan sebagai subjek.
    d. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan mitigasi prabencana tingkat lanjut, bukan hanya program mitigasi prabencana yang sudah pernah dilaksanakan dan sudah diketahui oleh masyarakat.
    e. Lebih serius dalam mematangkan konsep rencana program *sister village*, dengan bercermin dari erupsi-erupsi Gunung Merapi yang pernah terjadi.
    f. Khusus untuk daerah Cangkringan – Sleman, agar kiranya mulai difokuskan untuk mencari partner desa sebagai *sister village* untuk

tempat pengungsian yang aman bagi masyarakat yang tinggal di KRB (desa rawan).

g. Saat tanggap darurat, memberikan koordinasi yang secara *up-to-date* kepada masyarakat apabila terdapat potensi ancaman bencana mengenai kemana harus mengungsi dan kapan saja harus mengungsi.

2. Bagi masyarakat agar kiranya lebih peka dalam menyerap informasi dan bisa ikut andil dalam penerapan penanggulangan bencana di masa yang akan datang.
3. Bagi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian pola komunikasi penanggulangan bencana. Serta diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya, khususnya dalam hal pola komunikasi penanggulangan bencana, sehingga dapat mendorong peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djamarah, Bahri, Syaiful. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga.* Jakarta: PT Reneka Cipta.

Effendy, Onong Uchjana. (1989). *Kamus Komunikasi.* Bandung: PT Mandar Maju.

Kapucu, N., Hawkins, C., and Rivera, F. (eds) (2013). *Disaster Resilience Interdisciplinary Perspectives.* New York: Routledge.

Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nawawi, Hadari dan Martini. (1991). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rosady, Ruslan. (1998). *Manajemen Humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santana K, Septiawan. (2003). *Jurnalisme Investigasi.* Jakarta: Yayasan Obor.

Soejanto, Agoes. (2001). *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Susanto, Eko Harry. (2011). *Komunikasi Bencana.* Yogyakarta: ASPIKOM.

Tubbs, Stewart L., Sylvia Moss. (2001). *Human Communication.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Widjaja, H.A.W. (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal :

Davis, Laura N Medfort, G Bobby Kapur. "Preparing for effective communications during disaster: lessons from a World Healthy Organization quality improvement project", *International Journal of Emergency Medicine,* (Maret 2014), hal. 1-7.

Lestari, Puji, dkk, "Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 Saat Tanggap Darurat", *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, Vol. 10 No. 2 (Desember, 2013), hal. 139-158.

Nakamura, Hiroki, Hisao Umeki, Takaaki Kato. "Importance of communication and knowledge of disasters in community-based disaster-prevention meetings", *Journal Science Direct,* Vol. 99 Part B, (Agustus 2016), hal. 235-243.

Nurdin, Rudianto. "Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana", *Jurnal Simbolika: Research and Learning In Communication Study,* Vol. 1 No. 1 (April, 2015), hal. 51-61.

Pearce, Laurie. "Disaster Management and Community Planning, and Public Participation: How to Achieve Sustainable Hazard Mitigation", *Natural Hazards*, Vol. 28 Issue 2-3, (Maret 2003), hal. 211-228.

Surono, et al. "The 2010 Explosive Eruption of Java's Merapi Volcano – A '100 Year' Event", *Journal of Volcanology and Geothermal Research,* Vol. 241-242 (Oktober, 2012), hal. 121-135.

Wahyudi, Firman. "Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Asap di Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2016), hal. 1-15.

Wardyaningrum, Damayanti. "Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi Mitigasi Bencana (Studi pada Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi sebelum dan setelah erupsi tahun 2010)", Jurnal Komunikasi*,* Vol. 10 No. 2 (April, 2016), hal. 133-152.

Skripsi :

Apriyani, Efa. (2013). "Manajemen Prabencana Melalui Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Berbasis Komunitas di Kabupaten Sleman." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Astriani, Fiqih. (2017). "Mitigasi Bencana Gunung Merapi Berbasis Desa Bersaudara (*Sister Village*) di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Jawa Tengah." Skripsi Sarjana, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Kurniawati, Lucky Agustina. (2015). "Pola Rleasi Antara Negara dan Komunitas Relawan Jogja Timur dalam Penanggulangan Bencana Alam." Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Undang-Undang :

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Pasal 4, bagian c.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1, ayat 1-5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26, ayat 1, bagian b.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26, ayat 1, bagian c.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 34.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 35.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 44.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 48.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 57.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 58.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 59.

Internet :

"Arti Komunikasi." *http://kbbi.web.id/komunikasi* (akses 28 Agustus 2017).

"Arti Pola." *http://kbbi.web.id/pola* (akses 28 Agustus 2017).

BPBD Sleman. "Sejarah dan Struktur Organisasi BPBD Sleman." http://bpbd.slemankab.com/ (akses 17 Juli 2017).

BPPTKG Yogyakarta. "Sejarah dan Struktur Organisasi BPPTKG Yogyakarta." http://merapi.bgl.esdm.go.id/ (akses 17 Juli 2017).

CRI Yogyakarta. "Sejarah dan Struktur Lembaga CRI Yogyakarta." http://combine.or.id/ (akses 18 Juli 2017).

Diaz. "Inilah Kronologi Letusan Dahsyat Merapi di Jumat Pagi." http://m.tribunnews.com/amp/regional/2010/11/05/inilah-kronologi-letusan-dahsyat-merapi-di-jumat-pagi (akses 27 Agustus 2017).

"G. Merapi – Sejarah Letusan." http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1 (akses 25 Agustus 2017).

Gultom, Dwie Irmawaty, Zita Joyce. "Crisis communication capacity for disaster resilience: Community participation of information providing and verifying in Indonesian volcanic eruption." http://www.communityresearch.org.nz/wp-content/uploads/formidable/Crisis_communication_capacity_for_disaster_resilience.pdf (akses 16 September 2017).

Hunian Tetap Dongkelsari. "Data Desa Wukirsari." http://wukirsari-sleman.sid.web.id (akses 18 Juli 2017).

Priyatmono, Eko. “BNPB: Dari 127 Gunung Aktif di Indonesia, 3 Masih Meletus.” http://www.beritasatu.com/nasional/296381-bnpb-dari-127-gunung-aktif-di-indonesia-3-masih-meletus.html (akses 25 Agustus 2017).

Susilo, Budhi Kuswan. “Letusan Gunung Merapi : Antara Mitigasi Bencana dan Keyakinan Masyarakat.” http://www.kompasiana.com/budhikuswansusilo/letusan-gunung-merapi-antara-mitigasi-bencana-dan-keyakinan-masyarakat_55003ac5813311e118fa7312 (akses 25 Agustus 2017).

Swandewi, Dayu Mas. “Manajemen Sistem Informasi Dan Komunikasi Dalam Bencana.” https://www.scribd.com/doc/283167346/Manajemen-Sistem-Informasi-Dan-Komunikasi-Dalam-Bencana# (akses 22 September 2017).

LAMPIRAN

Lampiran 1

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1),
Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : 28 FEB 2017
Nomor : 147 / Dek / 70/Div.Um.RT / II / 2017
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi

Kepada Yth.
Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama	:	**BRILLIANT AYESHA NADINE**
Nomor Mahasiswa	:	**13321138**
Judul Skripsi	:	*Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta. Studi Tentang : Bencana Pada Gunung Merapi*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. rer. nat. Aditi Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,

Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,MA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Besi, Sleman, YOGYAKARTA 55584
Telp. 0274-898444, ext. 2106, Fax. 0274-898444, ext, 2106; E-mail:fpisb@uii.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : 6 Juni 2017

Nomor : 587 / Dek / 70/Div.Um.RT / VI / 2017

Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi

Kepada Yth.

Kepala Bidang Merapi BPPTKG DIY

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama	:	**BRILLIANT AYESHA NADINE**
Nomor Mahasiswa	:	**13321138**
Judul Skripsi	:	*Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta. Studi Tentang : Bencana Pada Gunung Merapi*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. rer. nat. Ariel Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,

Muzayin Nazaruddin, S.Sos., MA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Besi, Sleman, YOGYAKARTA 55584
Telp. 0274-898444, Ext. 2106, Fax. 0274-898444, Ext. 2106; E-mail:fpisb@uii.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1),
Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : 13 Februari 2017

Nomor : /29./ Dek / 70/Div.Um.RT / II / 2017

Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi

Kepada Yth.

Combine Resource Institution (CRI)

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama	:	**BRILLIANT AYESHA NADINE**
Nomor Mahasiswa	:	**13321138**
Judul Skripsi	:	*Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta. Studi Tentang : Bencana Pada Gunung Merapi*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,

Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,MA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Besi, Sleman, YOGYAKARTA 55584
Telp. 0274-898444, ext. 2106, Fax. 0274-898444, ext. 2106; E-mail:fpisb@uii.ac.id

A. PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN/PRA SURVEY*

B. IJIN PENELITIAN/SURVEY/PKL & PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN/SURVEY/PKL*

*) Lingkari A atau B yang sesuai.

Nomor : 070/909

Kepada Yth.
Ka. Bappeda Kabupaten Sleman

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	:	Brilliant Ayesha Nadine . A . Narra
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM	:	13321138
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3)	:	S1
4. Perguruan Tinggi/Lembaga	:	UII
5. Dosen Pembimbing Utama	:	Muzayin Nazaruddin, S.Sos, MA
6. Alamat Peneliti (sesuai KTP)	:	Jl. Bajininaca komp. P No. 30/19
	:	Makassar, Sul-Sel
7. Nomor Telepon/HP	:	0812 267 7267
8. Lokasi Penelitian/Survey/PKL	:	Hunian Tetap Pagerjurang
	:	
9. Judul Penelitian	:	Pola Komunikasi Penanggulangan Bencana Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Yogyakarta. Studi Tentang : Bencana Pada Gunung Merapi

Selanjutnya saya bersedia menyerahkan hasil Penelitian/Survey/PKL berupa 1 (satu) CD (Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan) format PDF selambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus/selesai.

Sleman, 2 Maret 2017

Yang menyatakan

Brilliant

Brilliant Ayesha Nadine

(nama terang)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 2 Maret 2017

Nomor : 070 /Kesbangpol/ 877 /2017
Hal : Rekomendasi
Pengambilan Data

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII
Nomor : 154/Dek/70/Div.Um.RT/II/2017
Tanggal : 28 Februari 2017
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan Data

Setelah mempelajari surat permohonan yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan **Pengambilan Data dengan judul "POLA KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA DARI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YOGYAKARTA. STUDI TENTANG : BENCANA PADA GUNUNG MERAPI** kepada :

Nama : Brilliant Ayesha Nadine
Alamat Rumah : Tamarunang Mariso Makassar Sulsel
No. Telepon : 08122677267
Universitas / Fakultas : UII / Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
NIM / NIP : 13321138
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta
Lokasi Pengambilan Data : Huntanp Pagerjurang Cangkringan Sleman
Waktu : 2 Maret 2017 - 2 April 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ir. Agus Soesilo Endiarto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19580803 198303 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 909 / 2017

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/877/2017 Tanggal : 02 Maret 2017
Hal : Rekomendasi Pengambilan Data

MENGIZINKAN :

Kepada	:
Nama	: BRILLIANT AYESHA NADINE
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 13321138
Program/Tingkat	: S1
Instansi/Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	: Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah	: Tamarunang Mariso Makasar Sulsel
No. Telp / HP	: 08122677267
Untuk	: Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul **POLA KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA DARI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT YOGYAKARTA. STUDI TENTANG : BENCANA PADA GUNUNG MERAPI**
Lokasi	: Huntap Pagerjuang Cangkringan Sleman
Waktu	: Selama 1 Bulan mulai tanggal 02 Maret 2017 s/d 01 April 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

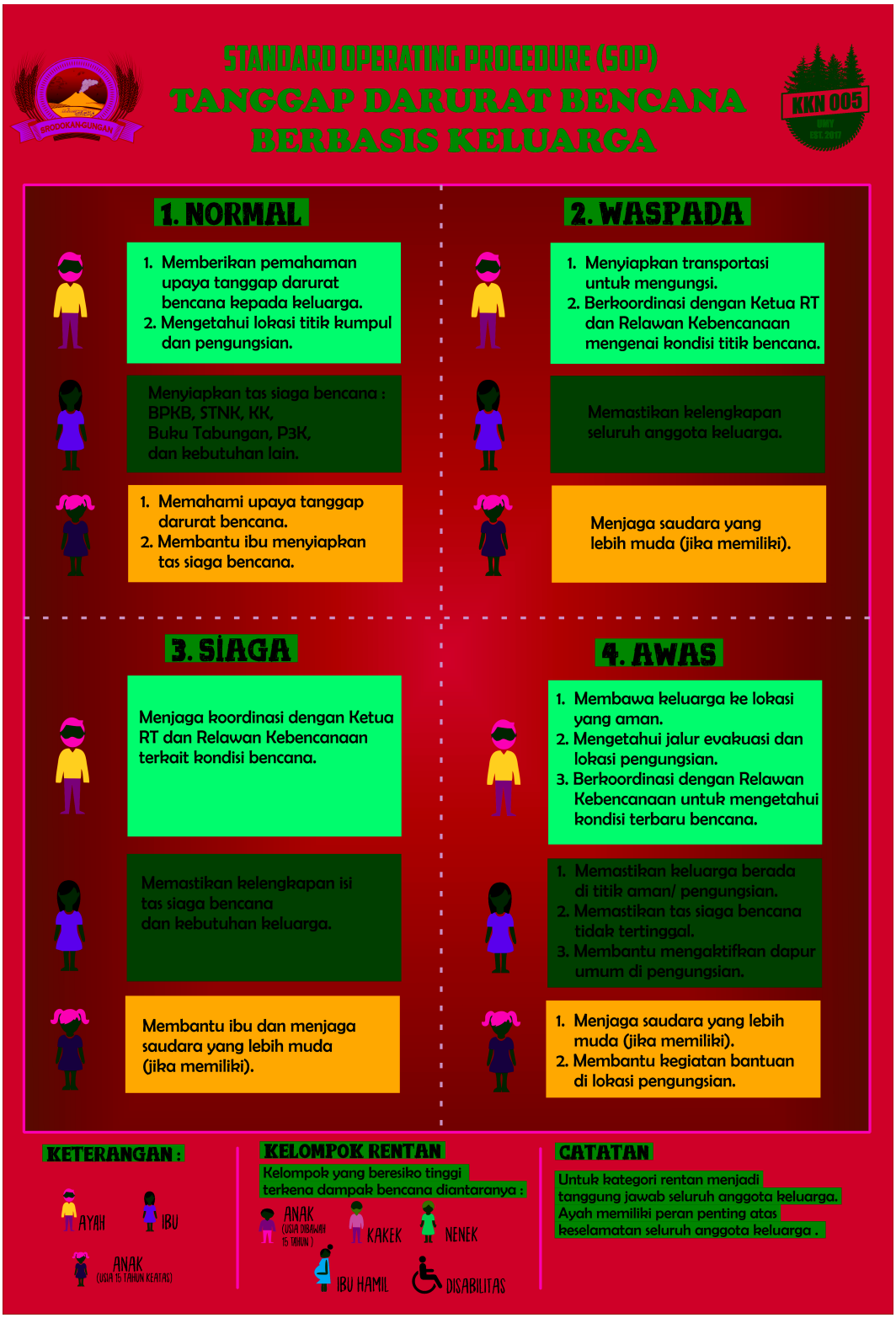
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 2 Maret 2017
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
u.b.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian

Ir. RATNANI HIDAYATI, MT
Pembina, IV/a
NIP 19660828 199303 2 012

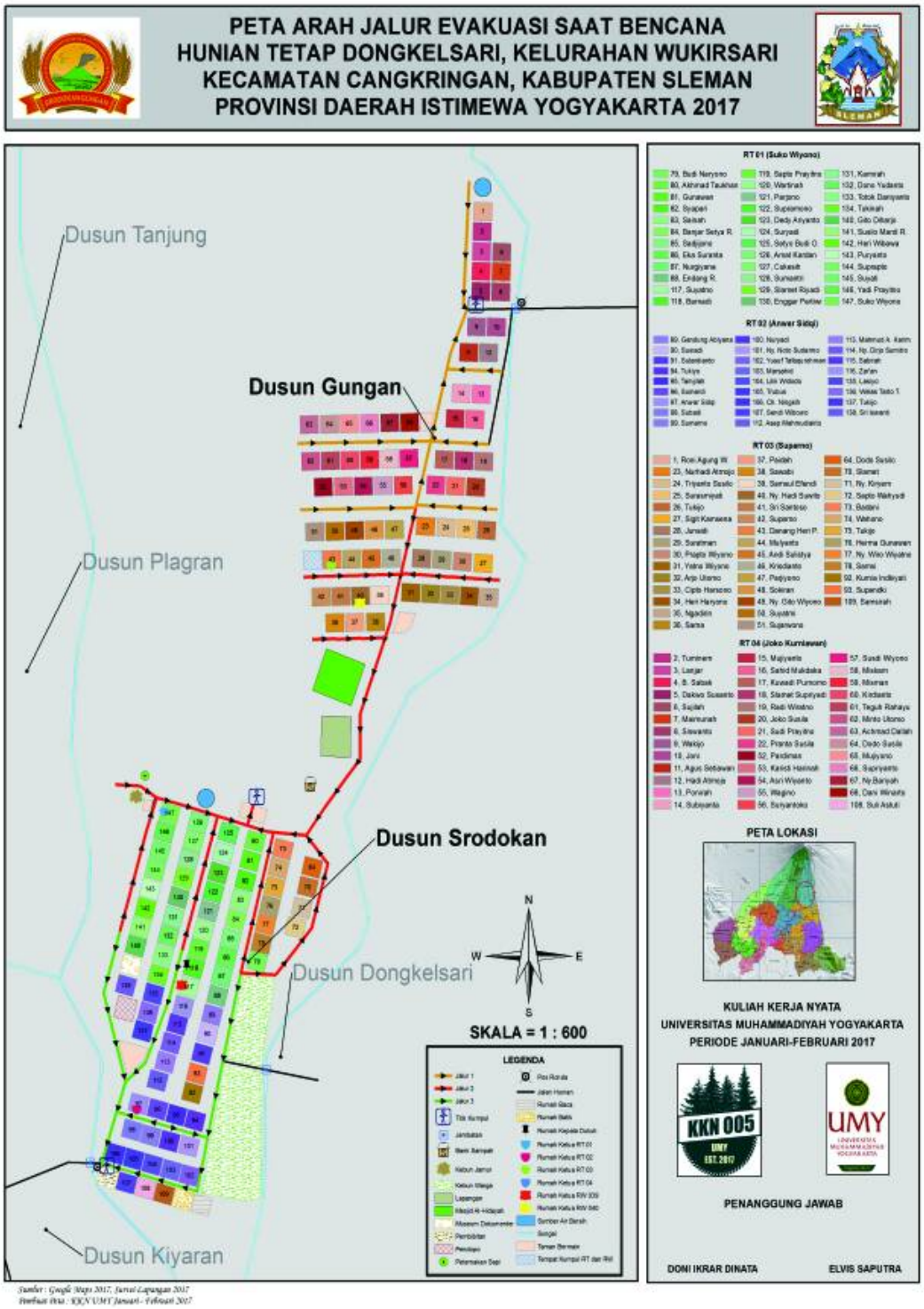
Tembusan :
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BPBD Kab. Sleman
3. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman
4. Camat Cangkringan
5. Kepala Desa Kepuhharjo, Cangkringan
6. Dukuh Pagerjuang Kepuhharjo Cangkringan
7. Dekan Fak. Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII
8. Yang Bersangkutan

Lampiran 2



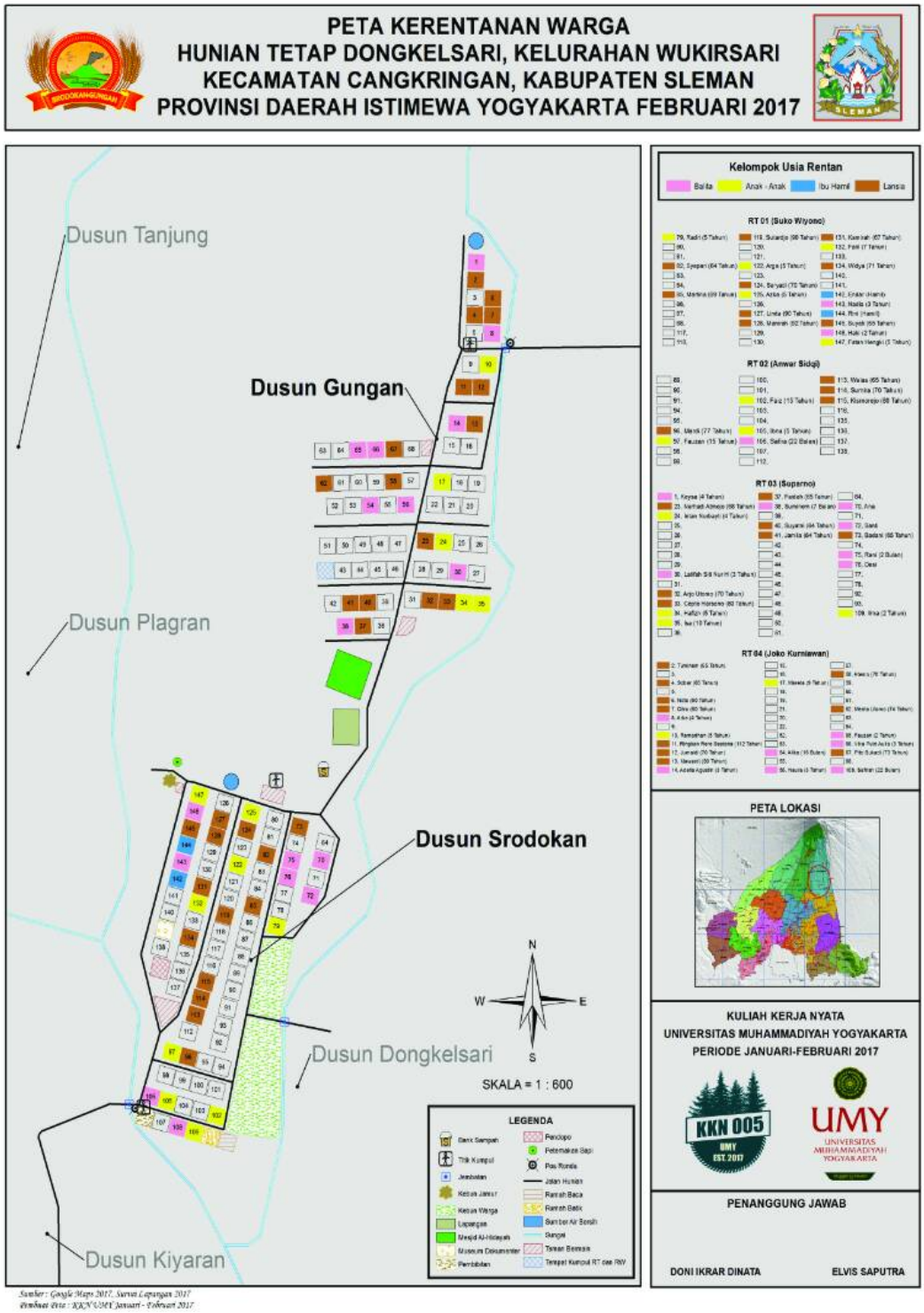
SOP tanggap darurat berbasis keluarga

(sumber : Totok Sondong Hartanto)



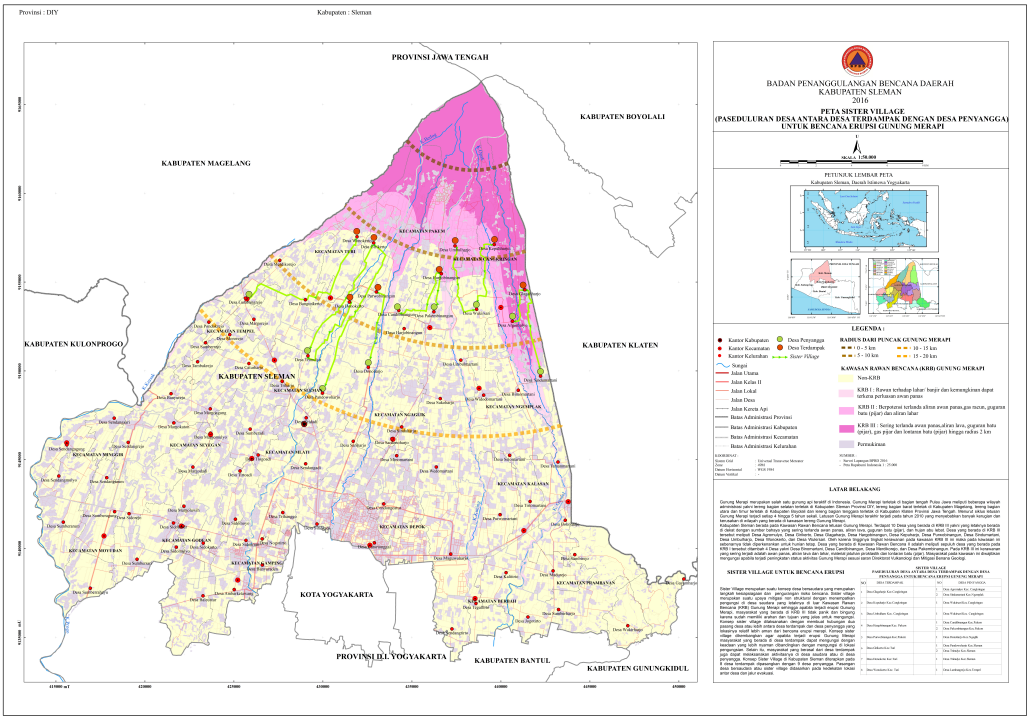
Peta jalur evakuasi Hunian Tetap Dongkelsari

(sumber : Totok Sondong Hartanto)



Peta kerentanan warga

(sumber : Totok Sondong Hartanto)



Peta sister village

(sumber : BPBD Sleman)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI
JALAN CENDANA NOMOR 15 YOGYAKARTA 55166
TELEPON : (0274) 514192, 514180 FAKSIMILE (0274) 563630 E-MAIL : bpptkg@esdm.go.id

LAPORAN AKTIVITAS GUNUNG MERAPI

Tanggal 26 Mei – 1 Juni 2017

I. HASIL PENGAMATAN

Visual

Cuaca cerah terjadi pada pagi dan malam hari, siang dan sore hari mendung dan berkabut. Asap berwarna putih, tebal dengan tekanan gas lemah, tinggi maksimum 250 m arah barat, teramati dari Pos Pengamatan Jrakah pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 08:17 WIB. Saat ini kondisi morfologi G. Merapi belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan (lampiran 1a).

Kegempaan

Dalam minggu ini kegempaan G. Merapi tercatat 1 kali gempa vulkanik (VT), 11 kali gempa guguran (RF) dan 11 kali gempa tektonik (TT). Aktivitas kegempaan minggu ini masih berada dalam kategori **normal**. Lampiran 1b menunjukkan grafik kegempaan di G. Merapi.

Deformasi

Data tiltmeter yang diperoleh dari Stasiun Selokopo Atas masih fluktuatif dalam batas toleransi alat, untuk sumbu U–S sebesar –30,86 µrad. Pengukuran EDM menghasilkan nilai jarak tunjam rata-rata untuk RK2 (sektor selatan) sebesar 6506,94 m. Data pemantauan baseline GPS Stasiun Selo–Pasarbubar menunjukkan jarak sebesar 4259,20 m.

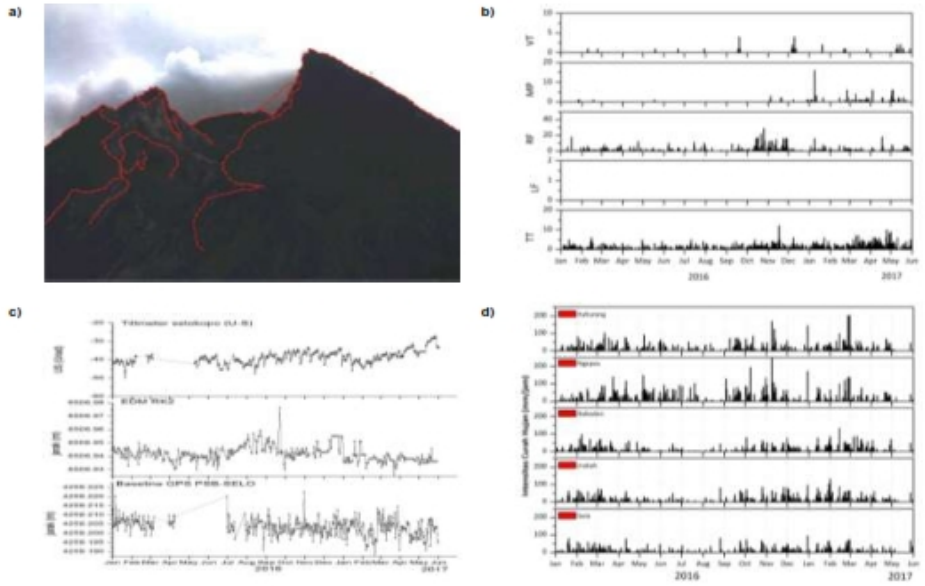
Deformasi G. Merapi yang dipantau secara instrumental dengan menggunakan tiltmeter, EDM dan GPS **tidak menunjukkan perubahan yang signifikan**. Lampiran 1c menunjukkan grafik deformasi di G. Merapi.

Hujan dan Lahar

Intensitas curah hujan tertinggi terjadi di Pos Pengamatan Ngepos, Intensitas curah hujan 20 mm/jam selama 60 menit pada tanggal 28 Mei 2017. Tidak dilaporkan terjadinya penambahan aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di G. Merapi. Lampiran 1d menunjukkan grafik curah hujan di G. Merapi.

Laporan aktivitas Gunung Merapi tanggal 26 Mei – 1 Juni 2017
(sumber : BPPTKG Yogyakarta)

II. LAMPIRAN



Lampiran 1. Pengamatan visual melalui kamera Stasiun Deles (a), foto diambil pada tanggal 29 Mei 2017. Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode seismik (b). Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode deformasi tiltmeter Stasiun Selokopo Atas, EDM Reflektor Kaliurang 2, dan *baseline* GPS Selo–Pasarbubar (c). Grafik curah hujan di Pos Pengamatan Gunung Merapi (d).

Lanjutan halaman sebelumnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental maka aktivitas G. Merapi dinyatakan dalam tingkat aktivitas "**NORMAL".**

Saran

Dengan tingkat aktivitas G. Merapi "**NORMAL**" kepada para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana G. Merapi direkomendasikan sebagai berikut:

- Kegiatan pendakian G. Merapi direkomendasikan hanya sampai di Pasarbubar, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. Kondisi morfologi puncak G. Merapi saat ini rawan terjadi longsor, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan para pendaki.
- Jika terjadi perubahan aktivitas G. Merapi yang signifikan maka tingkat aktivitas G. Merapi akan segera ditinjau kembali.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 Juni 2017
a.n. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,
Kepala BPPTKG

I Gusti Made Agung Nandaka
NIP. 19641227 199303 1 005

Lanjutan halaman sebelumnya